

LAPORAN
PUBLIK

PERKUMPULAN
PRAKARSA
2017



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

LAPORAN TAHUNAN PERKUMPULAN PRAKARSA 2017



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Konsep Laporan Tahunan 2017

Tahun 2017 merupakan tahun *network expansion* dalam kerja-kerja kami. Pada tahun 2017, Perkumpulan Prakarsa terlibat kerjasama dalam berbagai jaringan internasional dan nasional untuk memperkuat produksi dan *sharing* pengetahuan, advokasi kebijakan berbasis bukti dan pembiayaan organisasi. Langkah-langkah tersebut kami harapkan akan terus tumbuh pada tahun-tahun yang akan datang sehingga kapasitas, identitas, dan kontribusi Prakarsa sebagai lembaga penelitian dalam melahirkan ide-ide kesejahteraan dan inovasi kebijakan semakin baik. Selain itu, tahun 2017 merupakan tonggak sejarah bagi Prakarsa untuk kali pertamanya menjalin kerjasama programatik dengan *think-tank* bertaraf internasional, Health Policy Center University of Illinois at Chicago.

Dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada produksi dan *sharing* pengetahuan serta *engagement* khususnya dalam isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, Prakarsa berkomitmen untuk menghubungkan antara pengetahuan dengan kebijakan.

Tim Penyusun Laporan Tahunan 2017

Penanggung Jawab	: Ah Maftuchan
Koordinator Tim	: Eka Afrina Djamhari
Anggota Penyusun	: Herni Ramdlaningrum, Cut Nurul Aidha, Dia Mawesti, Widya Kartika, Anggara Yudha Zunivar, Rahmanda Muhammad, Irvan Tengku Harja, Dwi Rahayu Ningrum, Afriza Mufida, Erlin Setyowati, Anah Nurjanah dan Agus Susanto.
Layout dan design	: Anggara Yudha Zunivar
Dikeluarkan pada	: Juni 2018

@copyright 2018

Diterbitkan oleh:

Perkumpulan Prakarsa

Jl. Rawa Bambu 1, Blok A No. 8E RT 010/06, Kel/Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Tlp. 021-7811798, Fax. 021-7811897

e-mail: perkumpulan@theprakarsa.org

Website: www.theprakarsa.org

Terhubung dengan kami



<https://twitter.com/theprakarsa>



<https://www.facebook.com/perkumpulanPrakarsa>



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

<http://theprakarsa.org/new/in/home>



<https://www.linkedin.com/company/pekumpulan-prakarsa-centre-for-welfare-studies->

Terhubung dengan Inisiatif Kami:



<https://responsibank.id/>



<http://www.mpi-indonesia.org/>

Perkumpulan Prakarsa

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E RT 010 RW 06
Kel/Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520 INDONESIA
Ph. +62-21-7811-798 | Fax. +62-21-7811-897

e-mail to : perkumpulan@theprakarsa.org

DAFTAR ISI

Konsep Laporan Tahunan 2017	ii
Tim Penyusun Laporan Tahunan 2017	ii
Terhubung dengan kami	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vii
Prakata Board, Jaringan dan Mitra Prakarsa.....	ix
Prakarsa dalam angka	xi
Struktur Organisasi	xii
Profil <i>Founder</i>	xiii
Badan Pelaksana Harian dan Staf 2017.....	xv
Staf yang Pernah Bergabung pada Tahun 2017	xvii
Peserta Magang Perkumpulan Prakarsa.....	xix
Panel Ahli dan <i>Researcher Associate</i>	xx

I. KILAS PRAKARSA.....	1
1.1 Visi Misi Prakarsa	1
1.2 Kode Etik Prakarsa.....	2
1.3 Fokus Isu dan Pendekatan Prakarsa	3
A. Tiga Fokus Area Perkumpulan Prakarsa	3
B. Pendekatan Prakarsa	4
1.4 Arah Pengembangan Kelembagaan.....	6
II. KEGIATAN DAN CAPAIAN DI TAHUN 2017	8
2.1 Aktivitas Prakarsa di tahun 2017.....	8
2.2 Program Prakarsa di tahun 2017	12
A. <i>Social Policy</i>	12
B. <i>Fiscal Policy</i>	14
C. <i>Sustainable Development</i>	17
III. JARINGAN DAN AFILIASI	23
3.1 Forum, Afiliasi Prakarsa & <i>Research Associate</i>	23
Internasional.....	23
Nasional.....	25
3.2 Kepercayaan Perguruan Tinggi dalam Proses Magang	26
3.3 Lembaga Donor 2017	27
IV. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN	28
4.1 Penguatan Internal Organisasi.....	28
4.2 Laporan Keuangan.....	31
4.3 Hasil Audit	32
V. PRAKARSA DALAM MEDIA	34
5.1. Prakarsa dalam Berita Sepanjang tahun 2017	34
Berita <i>online</i> :.....	34
Berita <i>offline</i> /media cetak:	34
Opini di media cetak:	34



KATA PENGANTAR

Salam hangat untuk semua kolega,

Izinkan saya mewakili Badan Pelaksana Harian (BPH) Perkumpulan Prakarsa menyampaikan pengantar atas Laporan Tahunan 2017 Perkumpulan Prakarsa. Laporan ini merupakan laporan kondisi, dinamika dan perkembangan kami selama satu tahun terakhir. Laporan ini kami tujukan kepada Badan Pengurus (BP) Perkumpulan Prakarsa, mitra kerja dan publik secara luas. Harapannya, seluruh *stakeholders* mendapatkan informasi tentang Prakarsa dari sumber pertama.

Laporan ini juga kami tujukan sebagai salah satu bagian dari upaya membangun transparansi dan akuntabilitas program-keuangan yang kami jalankan. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi ini, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi *stakeholders* dalam mendukung kerja-kerja Prakarsa ke depan.

Tahun 2017 merupakan “tahun ekspansi” bagi Perkumpulan Prakarsa, baik dari sisi program maupun dari sisi kemitraan. Secara programatik, kami mendapatkan komitmen program dari beberapa lembaga pembangunan internasional dan nasional baik yang berdurasi pendek, menengah maupun panjang. Secara kemitraan, kami juga memperkuat kemitraan dengan *think-tank* dan universitas untuk agenda pertukaran pengetahuan dan kegiatan baik di tingkat nasional, regional maupun global. Ada beberapa tonggak sejarah yang menjadi penanda dari “tahun ekspansi” ini, antara lain:

Pertama, sebagai lembaga riset, pada tahun 2017 ini kami berhasil menjalin kerja sama dengan lembaga riset internasional yang mempunyai reputasi tinggi, antara lain: (i) Melakukan pertukaran pengetahuan dan kegiatan riset tentang Open Government di Indonesia dengan lembaga *think-tank* The Institute of Development Studies (IDS) - University of Sussex untuk riset tentang *Local Open Government* di Indonesia; (ii) Melakukan pertukaran pengetahuan dan program kerja sama riset tentang *illicit tobacco* dan reformasi kebijakan cukai rokok di Indonesia dengan Health Policy Center - University of Illinois at Chicago (UIC); (iii) Melakukan kerja sama riset tentang *The GoJek problem: congestion, informality and innovation in urban transport in Indonesia* dengan **Professor Riwanto Tirtosudarmo** (Indonesian Institute of Sciences/LIPI) and **Dr Robbie Peters** (The University of Sydney). Riset ini dibiayai oleh Australian National University (ANU) – Indonesia Project; (iv) Melakukan riset tentang “A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia: Challenges and Opportunities 2017” di bawah kepemimpinan dan bimbingan Professor Miranda Schreurs (Technical University of Munich – Germany) dan dibiayai oleh Friederich-Ebert-Stiftung Indonesia.

Kedua, sebagai lembaga riset, pada tahun 2017 ini kami berhasil mendapatkan kesempatan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan konferensi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa contohnya antara lain: (i) Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Prakarsa, menjadi narasumber tema Health Financing and Universal Health Covergae (UHC) pada acara Health Consultation Asia and North Africa in Bangalore India (3-6 Oktober 2017) yang diselenggarakan oleh Bread for the World (BfdW) Germany; (ii) Maria Lauranti, Program and Riset Manager Prakarsa, menjadi narasumber dalam “Global Policy and Practice Dialogue on Open Government” pada 25-26 Oktober 2017 di Institute of Development Studies, Brighton, the United Kingdom; (iii) dan lain-lain.

Ketiga, guna memperkuat kapasitas pengetahuan, kami melakukan pendekatan kepada peneliti papan atas untuk menjadi “research associate” di Perkumpulan Prakarsa. Pada tahun 2017, Professor Andrew Rosser (Professor of Southeast Asian Studies at the University of Melbourne – Australia) berkenan menjadi research associate di Prakarsa dan saat ini sedang melakukan riset dengan Prakarsa untuk tema *political-economy of extractive industry*. Selain itu, kami juga melakukan kerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk merekomendasikan mahasiswanya magang di Prakarsa. Saat ini secara rutin mahasiswa magang di Prakarsa dari Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Keempat, guna memperkuat pendekatan berbasis bukti dalam proses pembuatan kebijakan (*evidence-based policy making*), Perkumpulan Prakarsa dan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kajian dan Dukungan Teknis dalam Bidang Pendidikan-Pelatihan Kerja dan Ketenagakerjaan di Kantor Staf Presiden RI pada Rabu, 5 April 2017.

Kelima, pada tahun 2017 ini kami berhasil mendapatkan kepercayaan dari donor pembangunan untuk menjalankan program baru antara lain: (i) Novib Belanda dari 2017-2022 untuk program riset dan promosi *responsible bank and investment on social aspect and environmental aspect* di Indonesia dan di Asia; (ii) Health Policy Center - University of Illinois at Chicago (UIC) untuk program riset *illicit tobacco and sin-tax policy reform* (2017-2018) dengan potensi perpanjangan kerja sama sampai 2022; (iii) dan lain-lain.

Secara garis besar, kami percaya diri menatap 2018 dan tahun-tahun depan. Dari sisi internal, kami sudah melakukan proses penataan kelembagaan dan organisasi secara lebih baik. Keuangan Prakarsa pada tahun 2017 stabil dan positif. Dana yang kami kelola pada tahun 2017 meningkat 100% lebih dibandingkan dengan total dana yang kami kelola pada tahun 2016. Secara eksternal, kami juga makin mendapatkan kepercayaan dari *stakeholders* dalam konteks *policy-making process* dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Untuk isu kemiskinan, kesejahteraan dan perpajakan, beberapa media massa sudah menjadikan Prakarsa sebagai salah satu rujukan. Kolega dari berbagai latar belakang juga menaruh kepercayaan dan harapan kepada Prakarsa agar mampu menjadi “leading NGO-based think-tank” di Indonesia.

Beberapa capaian di tahun 2017 ini kami harapkan akan terus tumbuh pada tahun-tahun yang akan datang sehingga kapasitas, identitas, dan kontribusi Prakarsa sebagai lembaga penelitian dalam melahirkan ide-ide kesejahteraan dan inovasi kebijakan akan semakin baik. Kami akan terus memberikan yang terbaik kepada para pihak khususnya dalam kegiatan produksi dan berbagi pengetahuan serta *engagement* pada isu-isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa berkomitmen untuk terus berpikir, bekerja dan berinisiatif untuk kondisi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kami menunggu komitmen Anda semua untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan komitmen kami.

Terima kasih semua pihak yang mendukung kami selama ini. Terima kasih kepada pengurus dan staf Prakarsa yang telah bekerja cerdas dan bekerja keras. Terima kasih untuk kritik dan saran yang datang kepada kami. Selamat membaca laporan ini!

Rawa Bambu, Juli 2018

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa



PRAKATA BOARD, JARINGAN DAN MITRA PRAKARSA

BADAN PENGURUS PRAKARSA



“Ada kebanggaan tersendiri saat membaca lini masa Prakarsa menunjukkan peristiwa saat mereka diundang untuk memberikan kuliah umum di satu perguruan tinggi negeri terkemuka. Atau, diundang sebagai narasumber oleh pemerintah untuk berdiskusi dan memaparkan jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi negeri ini. Bukan hanya itu saja. Senyum saya juga mengembang saat Prakarsa berkunjung ke beberapa tempat di ujung dunia entah sebagai awal maupun di tengah-tengah proses kerjasama dengan lembaga riset di manca negara.”

“Suka atau tidak suka, saat ini adalah era media sosial. Kabar bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh sebagian besar orang satu dekade lalu atau sebelumnya. Kecepatan ini pula yang ‘memaksa’ penggunanya untuk merumuskan atau mencerna kabar dengan tergesa. Akurasi kadang-kadang dinomerduakan. Apalagi perkara kedalaman. Tantangan seperti ini menjadi krusial lantaran pada salah satu kerja Prakarsa adalah menawarkan kedalaman dan akurasi. Salah satunya dengan memproduksi pengetahuan. Saya berharap Prakarsa bisa mensiasatinya.”

Purnama Adil Marata

Anggota Dewan Pengawas Indonesia Berseru

PEMERINTAH PUSAT



“Beberapa waktu terakhir, Prakarsa memiliki fokus yang cukup kuat pada isu ketenagakerjaan. Kritik-kritik yang dilakukan ke pemerintah perlu terus dilakukan agar terdapat perbaikan kebijakan. Isu-isu terkait ekonomi digital dan advokasi jaminan sosial agar terus terus ditingkatkan. Saya berharap Prakarsa bisa mengkaji masa depan jaminan sosial di Indonesia, mulai dari integrasi PNS ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, transformasi ASABRI dan Taspen, hingga berbagai inisiatif atau model *employment benefit* lainnya. Ke depannya, saya juga berharap agar peluang kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Prakarsa dapat diperkuat dalam melakukan kajian-kajian kebijakan berhubungan dengan isu-isu yang ada.

Drs. Wahyu Widodo, MM

Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

AKADEMISI



"Prakarsa punya komitmen kuat dalam peningkatan kesejahteraan bangsa. Sejak sebelum mulainya implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, saya banyak berinteraksi dengan pimpinan dan peneliti Prakarsa. Saya terkesan komitmen pimpinan dan peneliti untuk terus mendapatkan informasi terkini tentang berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya untuk kaum *dhuafa*. Jika saja banyak lembaga semacam ini, maka *Insyallah* tujuan Membangun Negara Kesejahteraan akan cepat terwujud. Mari galang dan dukung Prakarsa. Semoga semakin jaya."

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

PRAKARSA DALAM ANGKA



Total Visits

40.481

Traffic Share

Desktop

70,22%

Mobile Web

29,78%



Followers

3.593

Jangkauan

358.816

Penayangan

582.439

Interaksi

28.262

Total Postingan

99



Tweets

50

Tweet Impressions

25.715

Profile Visits

2.197

New Followers

625

Mentions

222

Engagement Rate

2,65%



Lebih dari **63** Kegiatan selama satu tahun atau rata-rata lebih dari **5** Kegiatan diselenggarakan setiap bulannya baik di daerah, nasional maupun internasional

12 rilis media, **4** *policy brief/factsheet* dan **7** laporan publikasi

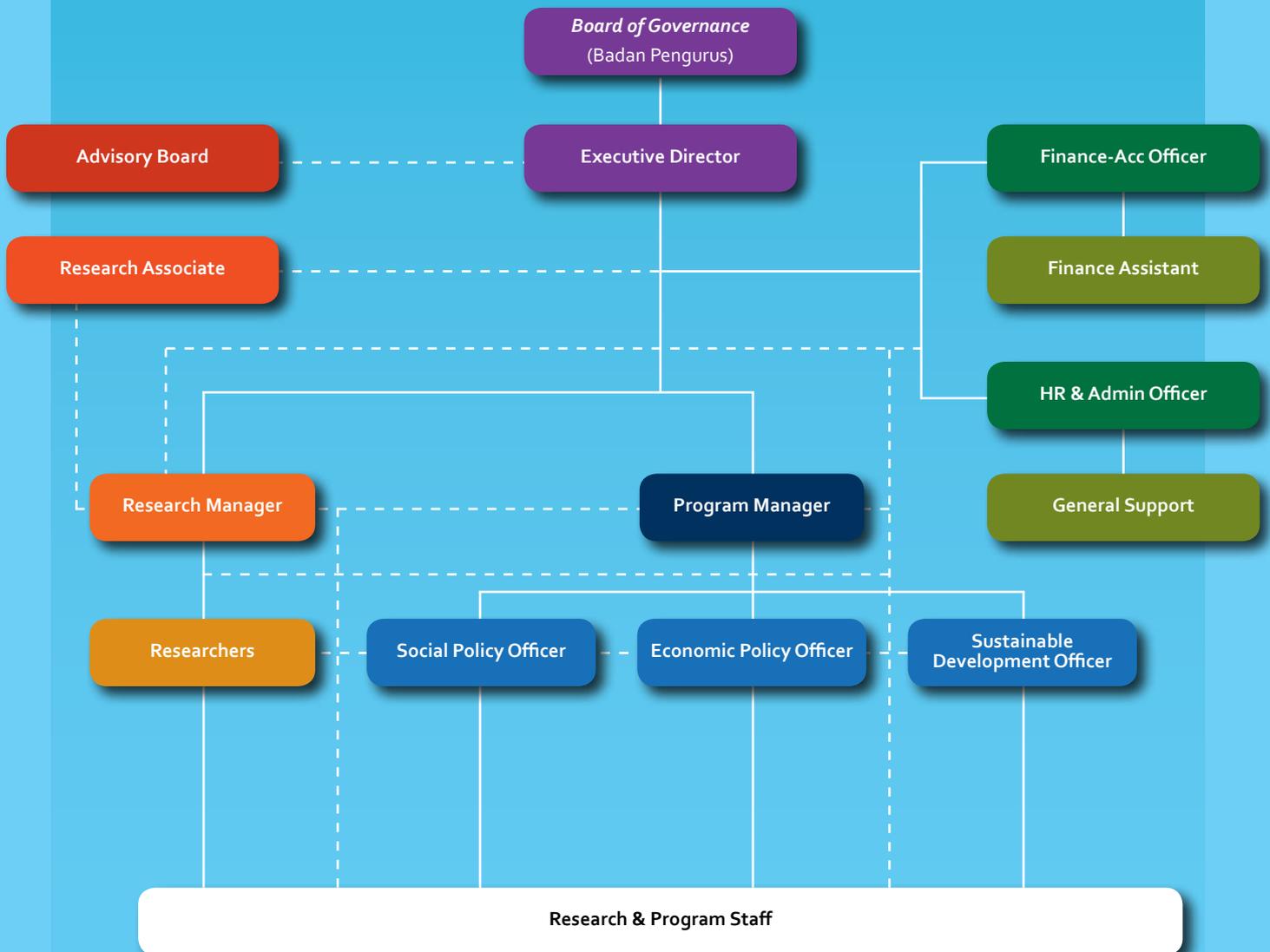
4 kali mengisi media *talkshow* di radio, **2** kali liputan televisi, **35** pemberitaan media *online*, dan **3** media cetak nasional.



Rp7.999.874.423,86
dana yang dikelola oleh Perkumpulan Prakarsa tahun 2017



STRUKTUR ORGANISASI



MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG ADIL DAN MERATA

PEMBICARA

Dr. Kaban Kominfo MPM



KEYNOTE SPEECH

14-15 JUNE 2017

Jakarta,
23 Mei 2017

PROFIL *FOUNDER*



Sugeng Bahagijo
Ketua

Sugeng Bahagijo menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa. Sehari-hari beliau adalah Direktur Eksekutif INFID. Di tingkat internasional, Sugeng Bahagijo merupakan anggota Steering Committee Open Government Partnership (OGP), anggota Steering Committee Asia Democracy Network (ADN) dan Asia Development Alliance (ADA). Pada tahun 2006-2007, Sugeng Bahagijo dipercaya sebagai Penasihat Kebijakan Kementerian Kesejahteraan Sosial.



Ati Nurbaiti
Sekretaris

Sekretaris Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Ati Nurbaiti, juga berkecimpung di dunia jurnalistik profesional di koran The Jakarta Post. Di samping itu, ia juga merupakan anggota Majelis Etik (ME) Nasional, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 2017-2020.



Yuyun Yunia Ismawati
Bendahara

Bendahara Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Yuyun Yunia Ismawati, juga merupakan Direktur Yayasan Bali Fokus. Dia juga merupakan seorang dosen yang sekaligus aktivis lingkungan. Yuyun adalah *focal point* Indonesia untuk GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). Pada tahun 2009, ia meraih penghargaan Goldman Environmental Prize (the "Green Nobel").



Bagus Giripurwo
Anggota

Anggota Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Bagus Giripurwo, juga merupakan Dosen Sosiologi di Universitas Bengkulu. Dia juga seorang Pengamat Sosial.



Purnama Adil Marata
Anggota

Sebagai anggota Dewan Pengurus, Purnama Adil Marata juga merupakan konsultan profesional di bidang advokasi dan strategi kampanye, *sustainable livelihood*, dan hak-hak ketenagakerjaan. Dia juga merupakan anggota dewan pengawas Indonesia Berseru.



Binny B. Buchori
Anggota

Anggota Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa yang dikenal sebagai aktivis HAM memulai karirnya sebagai wartawan di The Jakarta Post. Pada tahun 2000, ia tergabung dalam Tim Advokasi Penyelesaian Kasus (TAPAK) Ambon. Binny juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif INFID. Saat ini, dia bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputusan Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

BADAN PELAKSANA HARIAN DAN STAF 2017



Ah Maftuchan
Executive Director

Ah Maftuchan meraih gelar Pascasarjana Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Memiliki banyak pengalaman di NGO berkala Nasional maupun Internasional, berpengalaman sebagai peneliti, analisis, penulis dan pelatih dalam isu-isu pembangunan sosial, otonomi daerah, perpajakan dan kebijakan anggaran, perencanaan dan evaluasi tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik dan audit sosial. Sebagai Direktur, berperan memonitor kinerja seluruh anggota dan menjaga agar seluruh anggota tetap termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya.



Maria Lauranti
Program Manager

Maria Lauranti lulusan pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sebelumnya, aktif di berbagai NGO internasional dan pernah bekerja di sektor publik. Di Prakarsa, ia berperan untuk mengoordinasi tim secara internal agar seluruh program bisa terlaksana dengan baik, berkoordinasi dengan pihak eksternal, dan mengikuti pertemuan strategis di tingkat nasional maupun internasional. Memiliki ketertarikan pada isu kebijakan sosial. Menurutnya kebijakan adalah sebuah wadah untuk membuat perubahan yang berkelanjutan.



Afriza Mufida
HR and Admin Officer

Afriza Mufida sarjana lulusan Universitas Negeri Jakarta pada jurusan Sosiologi Pembangunan. Saat ini bertugas untuk membangun kapabilitas SDM serta meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan agar visi dan misi Perkumpulan Prakarsa terlaksana dengan baik. Afriza juga memiliki ketertarikan pada isu kebijakan sosial.



Dia Mawesti
Sustainable Development Officer

Dia Mawesti lulus dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Semangatnya pada isu-isu pengembangan ekonomi sosial dan berkelanjutan mendorongnya untuk mempromosikan ide keuangan berkelanjutan, kebijakan, dan praktik di Indonesia.



Widiya Kartika
Economic Policy Officer

Widiya Kartika sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, sudah memiliki 4 tahun pengalaman penelitian baik kualitatif dan kuantitatif dan pengelolaan program dalam bidang ekonomi publik, kebijakan publik dan tata kelola khususnya anggaran daerah. Tugas dan tanggung jawab dalam mengelola program/project. Siklus pengelolaan program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.



Setyo Budiantoro
Senior Researcher

Setyo Budiantoro mendapatkan gelar masternya di bidang Ekonomi Pembangunan di International Institute of Social Studies (ISS) dari Erasmus University Rotterdam. Dia juga berpartisipasi dalam beberapa program, termasuk Program Pascasarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, bergabung dengan program Analisis Kemiskinan Multidimensi oleh Universitas Oxford dan Universitas George Washington dan lain-lain. Dia memenangkan beberapa kompetisi pada ide-ide pengembangan serta penulis yang produktif dalam analisis kebijakan, artikel dan buku.



Eka Afrina
Researcher

Eka Afrina mempunyai pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dalam *complex humanitarian emergencies and development work, research, and monitoring and evaluation*. Eka lulusan Pascasarjana Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Berdasarkan pengalaman penelitian dan pemahaman isu-isu kebijakan sosial, saat ini ia bertanggung jawab mengelola program/proyek.



Irvan Tengku Harja
Program Assistant

Irvan Tengku Harja menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada jurusan Ilmu Politik. Peran tengku saat ini membantu pelaksanaan program dan penelitian. Tengku memiliki ketertarikan pada isu kebijakan sosial, terutama mengenai ketenagakerjaan.



Agus Susanto
General Support

Agus bergabung dengan Perkumpulan Prakarsa sejak 2008 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan selama sepuluh tahun. Secara umum Agus mendukung kebutuhan administrasi di dalam atau di luar kantor untuk semua kegiatan dalam Perkumpulan Prakarsa.

STAF YANG PERNAH BERGABUNG PADA TAHUN 2017



Victoria Fanggaldae
Research Manager

Victoria Fanggaldae lulusan Pascasarjana dari Program Studi Pembangunan Universitas Melbourne. Saat ini Victoria sedang menempuh pendidikan PhD – School of Social and Political Science (SSPS) The University of Melbourne, Australia. Dia memiliki pengalaman luas dalam penelitian lapangan terkait dengan isu-isu pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, dana pembangunan, kesehatan dan ketenagakerjaan.



Bernadetha Chelvi Yuliasuti
Human Resource & Administration Officer

Bernadetha Chelvi Yuliasuti meraih gelar sarjananya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada jurusan Ilmu Hukum. Sebelum bergabung dengan Prakarsa, Bernadetha sempat bekerja sebagai relawan bencana alam dan pelayan transaksi valuta asing.



Rini Damayanti
Finance Manager

Rinny Damayani meraih gelar sarjana dan pascasarjananya di Universitas Gunadarma pada tahun 2002. Rinny sudah menggeluti bidang *Finance & Accounting* selama belasan tahun. Sebelumnya ia pernah bekerja di beberapa NGO seperti Sajogyo Institute dan INFID.



Mathilda Antoinette Buisan
Finance & Accounting Officer

Mathilda Antoinette Buisan meraih gelar sarjananya di STIE Swadaya pada jurusan Akuntansi. Mathilda memiliki keterampilan di bidang penganggaran dan keuangan. Sebelum bergabung dengan Prakarsa, Mathilda sempat bekerja di Wahana Visi Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai proyek seperti Urban Project Jakarta dan Sigap Project.



Theresia Dwi Retnoningsih
Finance & Accounting Assistant

Theresia Dwi Retnoningsih meraih gelar sarjananya di Universitas Atma Jaya Jakarta pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Theresia memiliki kemampuan di bidang keuangan dan pengarsipan. Sebelum bergabung dengan Prakarsa, Theresia sempat bekerja di Wahana Visi Indonesia dan Jaringan Relawan Kemanusiaan di Klaten dan Aceh.



Rotua Nuraini Tampubolon
Sustainable Development Officer

Rotua Nuraini Tampubolon meraih gelar pascasarjananya di Universitas Sumatera Utara pada jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum bergabung di Prakarsa, Rotua sempat bekerja sebagai periset, dan reporter.



Agung Cahyanto
Social Policy & Governance Officer

Agung Cahyanto meraih gelar pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Agung memiliki kemampuan di bidang konsultasi. Ia berpengalaman menjadi konsultan di sektor publik bersama Bappenas/da BPNB dan lainnya. Selain itu ia juga pernah bekerja di sektor privat bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) terlibat dalam program terkait isu disabilitas. Agung memiliki ketertarikan pada isu kebijakan sosial.



Muhammad Maulana
*Social Policy & Governance
Officer*

Muhammad Maulana meraih gelar pascasarjananya di Flinders University pada tahun 2016. Maulana memiliki banyak pengalaman mengenai isu pemerintahan dan pembangunan. Pengalaman yang ia miliki didapatkan dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan NGO. Sebelum bergabung dengan Prakarsa, Maulana sempat bekerja di Seknas Fitra dan RTI International.



Ana Fitrotul Mu'arofah
Research Assistant

Ana Fitrotul Mu'arofah menempuh pendidikannya di Universitas Brawijaya pada Jurusan Ilmu Ekonomi. Semasa kuliahnya ia aktif bergabung di BEM tingkat fakultas di advokasi dan himpunan jurusan di bidang penelitian. Sebelum bergabung di Prakarsa, Ana bekerja di sektor publik membahas pembangunan wilayah pedesaan.

PESERTA MAGANG PERKUMPULAN PRAKARSA



Anggara Yudha Z
Magang

Anggara Yudha Z menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada jurusan Kesejahteraan Sosial. Semasa kemahasiswaannya Anggara giat berorganisasi seperti Indonesia Berseru "Young and Locavore Indonesia". Selama masa magangnya, Anggara terlibat pada proyek Responsibank Indonesia yang merupakan bagian dari jejaring Fair Finance Guide International di Indonesia.



Nopitri Wahyuni
Magang

Nopitri Wahyuni menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada jurusan Kesejahteraan Sosial. Semasa perkuliahan Nopitri pernah menjabat sebagai kepala divisi saintifik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial (HMIKS) yang bertugas melakukan riset, diskusi, dan publikasi terkait kesejahteraan sosial.



Veny Desna Waty
Magang

Veny Desna Waty menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia pada jurusan Administrasi Fiskal. Semasa kuliahnya Veny aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa UI pada divisi penelitian dan pengembangan.



Noah Ikkyu Swadhesi
Magang

Noah Ikkyu Swadhesi menempuh pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Noah aktif sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HIMIESPA) FEB UGM. Dirinya juga aktif dalam UGM Model United Nations (MUN) Community.

PANEL AHLI DAN *RESEARCHER ASSOCIATE*

1. Prof. Andrew Rosser, Ph.D.
2. Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
3. Prof. Dr. Hasbullah Thabrani
4. Prof. Dr. A. Erani Yustika
5. Dr. Bambang Ismawan (c)
6. Dr. B. Herry Priyono
7. Dr. Edi Suharto
8. Dr. A. Prasetyantoko
9. Dr. Poppy Ismalina
10. Dr. I. Praprtoraharjo
11. Dr. Zulfan Tadjoeuddin
12. Dr. Sutoro Eko
13. Luhur Fajar Martha, M.SE
14. Paskal Kleden
15. Dr. Fachru Nofrian, Ph.D.
16. Dr. Ari Sujito
17. Dr. Berly Martawardaya



I. KILAS PRAKARSA

Perkumpulan Prakarsa -- *Welfare Initiative for Better Societies* -- didirikan pada bulan Agustus tahun 2004 oleh sejumlah aktivis senior dan jurnalis yakni Bagus Giripurwo, Yuyun Yunia Ismawati, Purnama Adil Marata, Ati Nurbaiti Sugeng Bahagijo, Binny Bintarti Buchori dan Darmawan Triwibowo.

Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mengeksplorasi dan menggali ide-ide inovatif mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui penelitian independen dan keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan. Prakarsa melakukan penelitian, analisis, dan pengembangan kapasitas mengenai berbagai topik yang terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan. Prakarsa bekerja dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi internasional, sektor swasta dan media masa untuk membawa ide-ide menjadi inisiatif dan tindakan. Prakarsa didukung para ahli, intelektual, dan praktisi yang memiliki reputasi di kalangan akademik atau pengambil kebijakan untuk menghasilkan penelitian dan analisis yang inovatif, serta mengajukan ide-ide praktis dan spesifik menjadi sebuah tindakan.

1.1 VISI MISI PRAKARSA

Visi:

“Menjadi lembaga kajian dan pengembangan yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif dalam bidang kesejahteraan demi mewujudkan keadilan sosial”

Misi:

1. Melakukan kajian/riset tentang peran negara, masyarakat sipil dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas.
3. Memproduksi dan mempromosikan pengetahuan serta wacana baru tentang “*pro welfare policy*”.
4. Mengelola jaringan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

1.2 KODE ETIK PRAKARSA

Etika yang diterapkan dalam organisasi:

A. Keadilan dan kesejahteraan

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang obyektif, adil dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan karyawannya. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

B. Integritas

Organisasi dan staf melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dengan penuh integritas. Integritas bermakna bahwa organisasi dan staf akan menjaga kejujuran dan memegang prinsip moral yang mendahulukan kepentingan bersama, akuntabilitas dan kejujuran dalam praktik kerjanya. Staf Prakarsa sesungguhnya mewakili organisasi. Dengan demikian staf harus menyadari bahwa dalam perilaku yang dibawakan staf menjadi bagian dari organisasi.

C. Loyalitas

Organisasi akan mengupayakan lingkungan kerja yang kondusif bagi staf untuk belajar, tumbuh dan produktif dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa investasi pada sumberdaya manusia merupakan kewajiban untuk membangun keterikatan dan kesetiaan staf terhadap organisasi. Staf berupaya untuk menjaga wibawa, kepentingan dan mandat organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Staf mengetahui posisi organisasi dalam seluruh kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi dan mendukung kerja-kerja advokasi tersebut. Staf harus melakukan segala upaya untuk mempromosikan kepentingan yang baik bagi organisasi.

D. Disiplin

Organisasi akan menegakkan kedisiplinan, dengan menetapkan kebijakan secara transparan dan mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran. Proses akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua staf mematuhi dan menyesuaikan diri dengan petunjuk dan peraturan organisasi, baik dengan maupun tanpa pengawasan. Jika terjadi pelanggaran, dan perselisihan, seluruh staf harus menjaga itikad baik untuk mencari jalan keluar dan solusi yang baik bagi kepentingan bersama.

E. Toleransi

Organisasi berkomitmen untuk menjadi lembaga yang inklusif dan mandiri dalam lingkup kerja *civil society organization*. Dengan demikian, organisasi memastikan posisi dan arah strategis organisasi akan mengutamakan persatuan bangsa dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Seluruh staf dan organisasi turut bersikap penuh toleran terhadap perbedaan dalam dan diluar organisasi. Dalam perbedaan pendapat, semua staf dan organisasi harus saling menghormati dan santun dalam mengupayakan terjadinya dialog antar pribadi.

F. Partisipatif

Organisasi berkomitmen untuk mendorong lingkungan kerja yang partisipatif dengan landasan bahwa semua pihak memiliki kapasitas dan tekad untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi, pendekatan partisipatif akan diupayakan. Pendekatan ini turut diterapkan dalam relasi eksternal organisasi dengan pihak lainnya, termasuk donor, pemerintah, parlemen, rekan CSO, akademisi dan ahli lainnya.

G. Anti suap dan korupsi

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk menegakkan etika anti-suap dan korupsi dalam kebijakan organisasi, baik secara keuangan maupun relasi organisasi.

1.3 FOKUS ISU DAN PENDEKATAN PRAKARSA

A. Tiga Fokus Area Perkumpulan Prakarsa



1. Kebijakan Kesejahteraan (*Social Welfare Policy*)

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa kesejahteraan warga negara merupakan tujuan dan sekaligus sarana kemajuan sebuah bangsa. Isu-isu strategis mengenai pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan dan layanan publik dasar adalah hal-hal sentral dalam kebijakan kesejahteraan. Perkumpulan Prakarsa berpandangan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah pendapatan ekonomi, namun juga mencakup persoalan akses terhadap pelayanan publik dan terpenuhinya hak-hak dasar lainnya. Kemiskinan tidak cukup diukur hanya dari sisi ekonomi saja, namun bersifat multidimensi. Kemiskinan adalah deprivasi terhadap kapabilitas manusia. Persoalan ketimpangan juga lebih luas dari kesenjangan ekonomi, namun juga menyangkut akses dan kesempatan.

Ketimpangan terjadi karena kebijakan dan instrumen redistribusi kurang berjalan baik. Perkumpulan Prakarsa kini menurunkan cita-cita besar negara kesejahteraan dalam kajian, riset dan advokasi mengenai reformasi kebijakan kesejahteraan.

2. Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa pajak sangatlah vital untuk sumber pendapatan negara, pembiayaan pembangunan, instrumen mengurangi ketimpangan dan tegaknya kemandirian ekonomi politik. Pajak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa, sebab kita tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pendapatan negara dari sumber daya alam. Sayangnya, system perpajakan kita hingga kini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan (*tax justice*) yang lebih substantif. Kepatuhan dan kontribusi orang-orang kaya dan perusahaan besar dalam membayar pajak masih relatif rendah pun tarif yang dikenakan masih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak masih jauh dari potensi yang ada. Selain itu, kebijakan anggaran masih belum mencerminkan semangat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karena itu, Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mendorong kebijakan fiskal yang berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih konkrit oleh seluruh warga negara agar kesejahteraan meningkat. Kajian dan riset kebijakan fiskal berkeadilan (*fiscal justice*) telah dituangkan dalam bentuk buku, *policy brief*, *policy review*, *factsheet* dan *audio-visual*.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Perkumpulan Prakarsa percaya bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan bijak, efektif dan berkeadilan untuk memastikan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Nyatanya kekayaan sumber daya alam justru menjadi kutukan dan hanya akan memberikan kesejahteraan temporer bagi warga negara, dan mendatangkan kemiskinan dan kesenjangan yang lebih lebar dalam jangka panjang.

Oleh karena itu Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan guna mendukung pencapaian target SDGs melalui kajian dan advokasi terkait kebijakan ekonomi hijau, serta mendorong kebijakan dan praktik sektor swasta yang bertanggungjawab. Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus antara lain *green economy*, *green banking and investment*, *sustainable finance*, *business and human rights*, *social and environmental business responsibilities*. Perkumpulan Prakarsa juga mengembangkan perangkat penilaian bank berdasarkan kebijakan investasi yang bertanggungjawab (*responsible investment*) bersama jaringan Fair Finance Guide International dan Responsibank Indonesia.

B. Pendekatan Prakarsa

1. KNOWLEDGE PRODUCTION	2. PROGRAM DELIVERY	3. ENGAGEMENT
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Upstream and downstream research</i> • <i>Evidence based policy research</i> • <i>Dissemination</i> • <i>Mainstreaming</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pioneering and piloting</i> • <i>Monitoring and evaluation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy advocacy</i> • <i>Networking</i> • <i>Voicing</i> • <i>Policy and knowledge conversation</i>

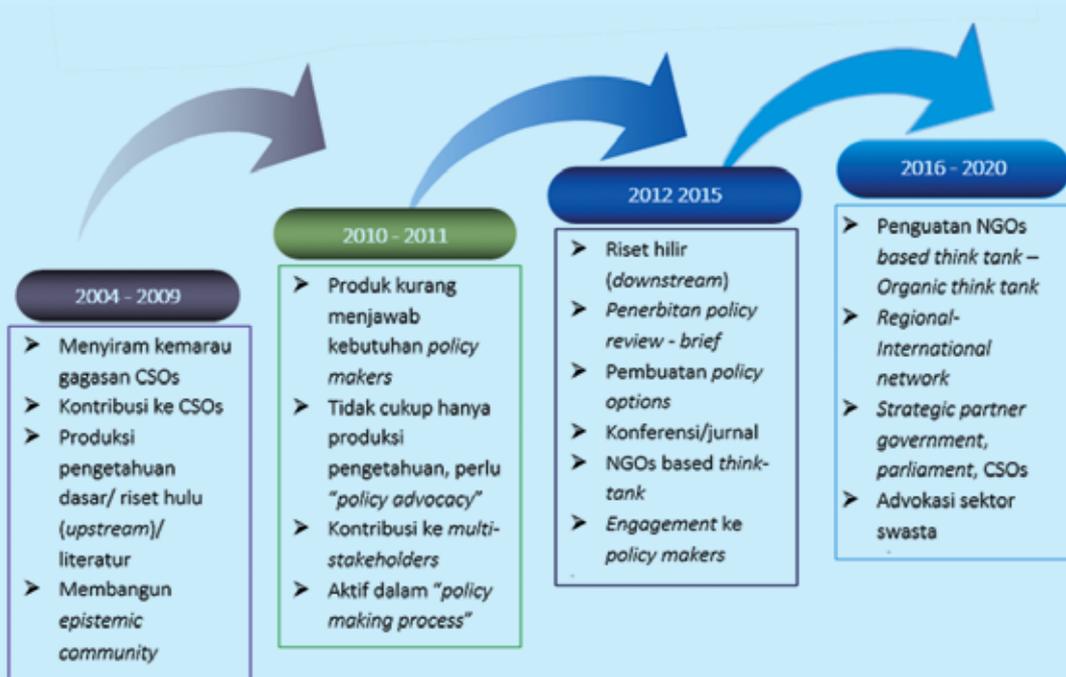
Knowledge Production. Perkumpulan Prakarsa sebagai lembaga penelitian berkomitmen untuk terus memproduksi pengetahuan melalui riset sebagai *evidence-based policy recommendations* bagi para perencana atau pembuat kebijakan. Prakarsa bergerak dalam pengembangan riset dari hulu ke hilir. Riset yang dilakukan berupaya melihat keberhasilan kebijakan, meng-*highlight* bukti-bukti yang menunjukkan kesenjangan kebijakan, anggaran, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan atau program. Output yang dihasilkan berupa *research report/paper, policy review, policy brief, factsheet, infografis, dan article journal*. Selanjutnya Prakarsa juga aktif melakukan desiminasi hasil riset sebagai bagian dari upaya mainstreaming sebuah isu kebijakan.

Program Delivery. Prakarsa sebagai pengagas atas ide-ide isu kebijakan sosial, menggunakan strategi advokasi kolektif untuk mengadvokasikan isu-isu yang menjadi fokus lembaga dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil lainnya untuk isu tertentu dalam suatu forum atau koalisi bersama. Suara kolektif dianggap lebih kuat daripada suara tunggal (*self-advocacy*) saat kampanye berjalan. Menjadi bagian dari kelompok advokasi kolektif dapat membantu Prakarsa dalam memperjuangkan masalah atau isu yang kompleks dan berat. Monitoring dan evaluasi kebijakan sosial juga dilakukan. Kelompok organisasi lainnya juga dapat memperoleh manfaat dukungan sumber daya dan bantuan terampil dari koalisi advokasi kolektif.

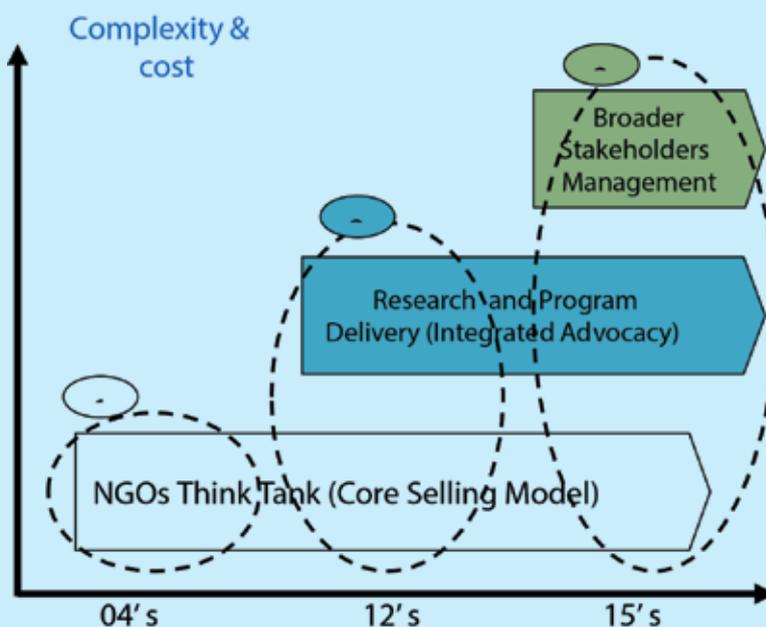
Engagement. Perkumpulan Prakarsa membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian nasional/daerah di Indonesia dan luar negeri, organisasi masyarakat sipil (nasional, daerah dan internasional), sektor swasta, kedutaan besar, serta organisasi internasional untuk memperkuat usaha advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa. Prakarsa juga aktif terlibat dalam berbagai forum dalam dan luar negeri untuk menyuarakan perbaikan kebijakan yang berlaku.

Transformasi kelembagaan Prakarsa

Pendekatan Prakarsa mengalami transformasi dari tahun ke tahun sebagai refleksi atas perkembangan kebijakan yang berjalan.



1.4 ARAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

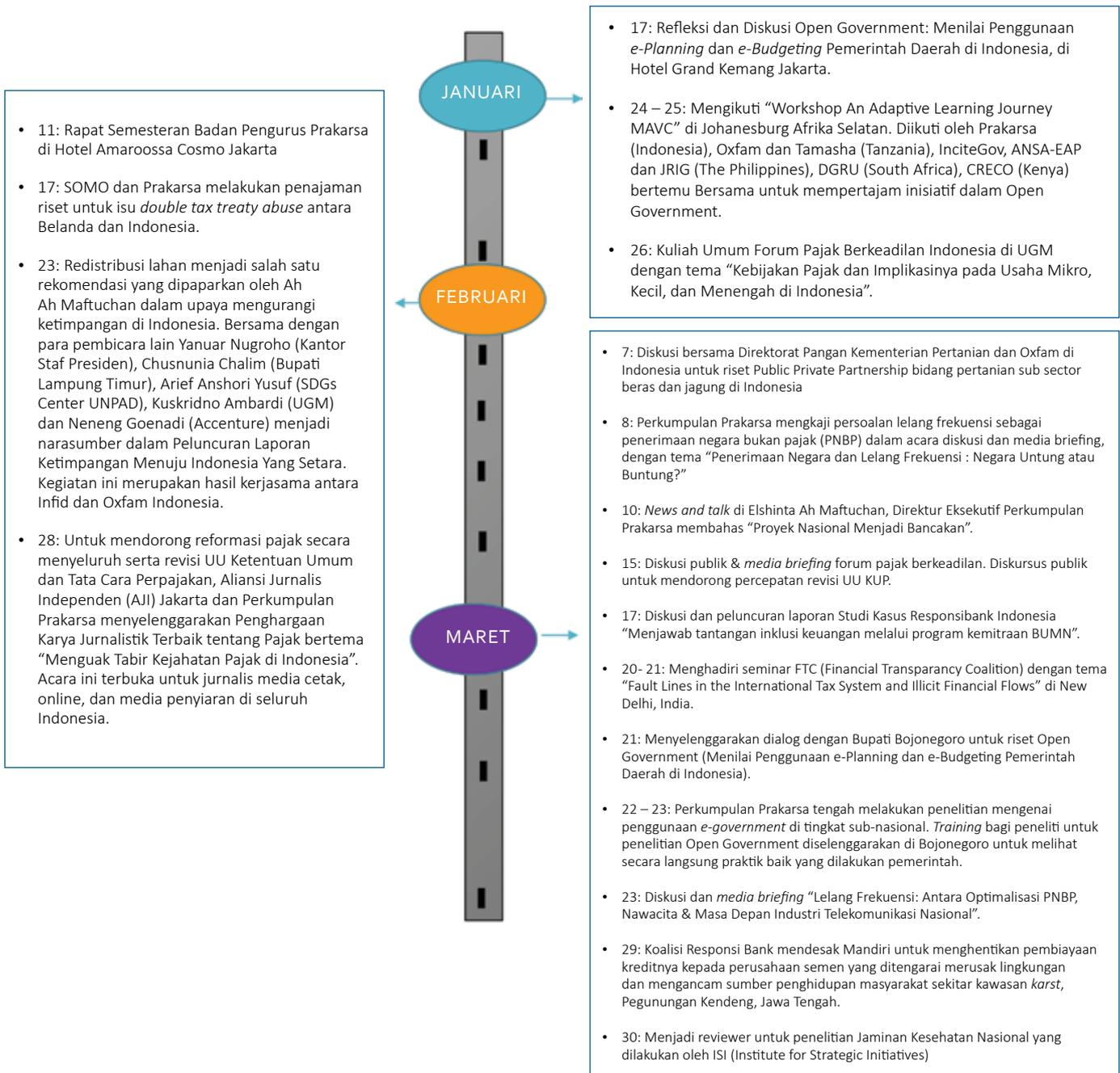


- ◇ Fokus menjadi organisasi yang kredibel, berpengaruh & *sustainable*
- ◇ Lincah beradaptasi terhadap perubahan model pengelolaan NGOs *think tank*
- ◇ Meningkatkan *program approval rate* dengan meningkatkan *research & program regulatory scrutiny* atas suatu isu
- ◇ Meningkatkan kemampuan berkompetisi melalui *high quality research & program delivery*
- ◇ *Innovative research and program*
- ◇ Berkompetisi dalam mendapatkan *top talent* dalam lingkungan NGO dan kompetisi dengan non-NGO
- ◇ Pengembangan skema pembiayaan yang inovatif
- ◇ Pengembangan organisasi dengan melaksanakan *human capital system*
 - *Human capital system (Engagement & Retention)*
 - Dimilikinya *set of competence & skills model*
 - Membangun *high performing teams*



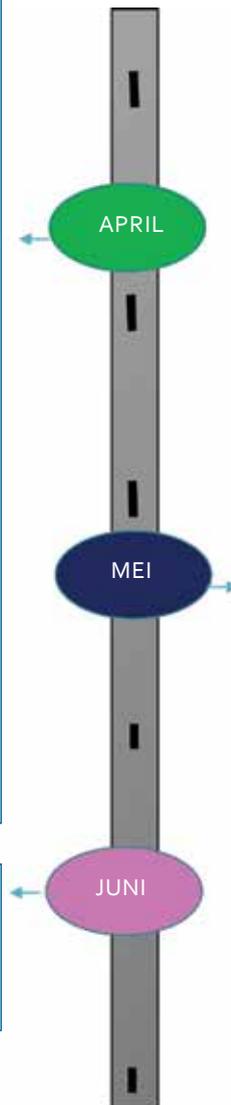
II. KEGIATAN DAN CAPAIAN DI TAHUN 2017

2.1 AKTIVITAS PRAKARSA DI TAHUN 2017



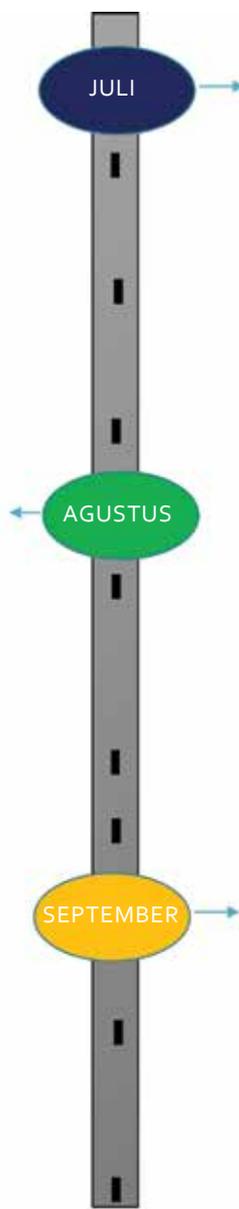
- 3 – 4: Pelatihan Riset Bank Assesment, Fair Finance Guide Methodology oleh Profundo Belanda dihadiri anggota Koalisi ResponsiBank Indonesia.
- 4: Pertemuan konsolidasi antar CSOs di kawasan Asia untuk memulai inisiatif baru terkait responsible bank and investment, di Bangkok, Thailand.
- 5: Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui kajian yang menjadi dasar bagi *evidence-based policy*, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kajian dan Dukungan Teknis dalam Bidang Pendidikan-Pelatihan Kerja dan Ketenagakerjaan di Kantor Staf Presiden RI pada Rabu, 5 April 2017.
- 5: *Expert review* penelitian “Public-Private Partnership di Sektor Pertanian: Kajian atas Sub-sektor Komoditi Beras dan Jagung”.
- 6: Memberi kuliah umum tentang isu perpajakan bagi mahasiswa Universitas Indonesia, kerjasama antara Prakarsa, BEM FIA, dan Forum Pajak Berkeadilan. Kuliah umum ini dilakukan atas kerjasama Forum Pajak Berkeadilan dengan Departemen Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sebagai upaya sharing knowledge untuk meningkatkan awareness publik terutama mahasiswa terhadap isu-isu perpajakan
- 11: Diskusi Publik “Evaluasi Kebijakan *Tax Amnesty*”, kerjasama antara Prakarsa dan Forum Pajak Berkeadilan Indonesia.
- 20: FGD bersama CSO yang memiliki fokus terhadap isu Open Government di Jakarta.
- 26: Memberi kuliah umum tentang isu perpajakan bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kerjasama antara Prakarsa, BPPM Balairung, dan Forum Pajak Berkeadilan.

2 – 3: Pertemuan co-authors dan diskusi terbatas dalam penelitian “Renewable Energy” kerjasama dengan FES. Di JS Luwansa Jakarta, dihadiri oleh co-authors dari Jerman, Vietnam dan Filipina dan Indonesia.



- 3: Audensi dengan Direktorat Energi Terbarukan, Kementerian ESDM untuk penelitian mengenai *Renewable Energy*.
- 16: Diskusi Publik dan Pengumuman Lomba Karya Jurnalistik dengan tema “Menguak Tabir kejahatan Pajak” di Jakarta.
- 14 – 18: Mengikuti *Workshop Adjective Learning Journey MAVC “Reflective Learning Workshop #3”* di Manila, Filipina.
- 19- 21: Prakarsa dengan dukungan FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (FES) telah melakukan sebuah studi mengenai transisi energi/transfarmasi di Asia. Memaparkan hasil temuan di Jepang Bersama dengan professor dari berbagai universitas di Jepang dan Jerman. Pemateri dalam *Workshop Comparative Studies on Social Equitable Energy Transition in Asia*.
- 23: *Launching* hasil penelitian “Equitas Bantuan Iuran Bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia”, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
- 23: Dialog Kebijakan “Jaminan Kesehatan Nasional yang Adil dan Merata”, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
- 28- 29: Mengikuti pertemuan tematik *Finance for Development* dengan SOMO. Kegiatan di Siam Reap, Cambodia
- 30: Mengikuti *Global Strategic Partnership Symposium* dan berdiskusi dengan SOMO untuk kegiatan training pajak di Indonesia dan penelitian *Double Treaty Agreement Abuse* yang sedang berjalan. Kegiatan di Siam Reap, Cambodia.
- 31: *Press Briefing Sustainable Finance* di Hotel Mercure Cikini.

- 19: Menjadi Narasumber untuk memaparkan hasil penelitian JKN dalam kegiatan Penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
- 29: Peluncuran Hasil Penelitian & Dialog Kebijakan Mengkaji Penggunaan E-government di Pemerintahan Daerah di Indonesia. Di Hotel Mercure Cikini, Jakarta. Dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah, CSO, akademisi dan provider.
- 22: *Training on the revision of Banking Law and OJK Regulation on Sustainable Finance* di Hotel Grand Kemang untuk Koalisi Responsibank Indonesia.

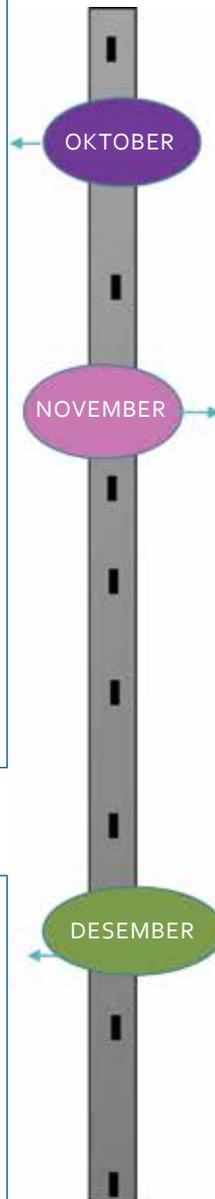


- 10-20: Direktur Eksekutif Prakarsa terlibat dalam High Level Political Forum (HLPF) 2017 di PBS New York, yang merupakan forum untuk me-review pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tahun ke-2
- 25-27: Training riset investigasi pajak oleh SOMO dan Prakarsa dengan peserta jaringan Regional Asia (Vietnam, Filipina, India, Timor Leste dan Thailand) di Bali.

- 4 – 8: *Making All Voices Count Reflective Learning Workshop #4* di Brighton, UK
- 19 – 22: Menjadi Narasumber dalam Regional conference “The Pathway to a Socially Just Energy Transition In Asia” and an Internal Workshop, focusing on Collecting Ideas and Enhancing Knowledge on Energy, the Environment and Climate Change across FES in Asia. Kerjasama dengan FES Indonesia.
- 23: Knowledge Network Building, Professor Andrew Rosser yang berkhidmat di Southeast Asian Studies di University of Melbourne Australia berkenan menjadi research associate di Perkumpulan Prakarsa.
- 25: Perkumpulan Prakarsa, berlangsung research preparation meeting untuk membahas penelitian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari bentuk program Inklusi Keuangan yang Responsif Gender.
- 26 – 29: Menjadi Narasumber dalam *Workshop* Penguatan Kelompok Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak di Yogyakarta. Kerjasama dengan Infid.

- 2 – 5 Oktober: Monitoring pelaksanaan program BFDW kepada masyarakat dan pemerintah daerah di Mamuju Bersama dengan YASMIB.
- Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Prakarsa, menjadi narasumber tema Health Financing and Universal Health Covergae (UHC) pada acara Health Consultation Asia and North Africa in Bangalore India (3-6 Oktober 2017) yang diselenggarakan oleh Bread for the World (BfdW) Germany
- 7 Oktober: Pelatihan untuk Peneliti Case Study KUR untuk membahas desain riset, tools dan persiapan turun lapangan.
- 13 Oktober: Menghadiri ISEA Conference (*Capacity Building*) di Bali. Training from Clear Thinking to Compeling Presentation and ISEA (Social Enterprise Advocacy and Leveraging) Conference.
- 17 Oktober: *Bilateral meeting* dengan Rainforest Foundation Norway
- 20 Oktober: Menjadi Panelis dalam AsPac Anti Corruption Meeting.
- 25 – 26: Maria Lauranti, Program and Riset Manager Prakarsa, menjadi narasumber dalam “Global Policy and Practice Dialogue on Open Government” pada 25-26 Oktober 2017 di Institute of Development Studies, Brighton, the United Kingdom

- 6: Direktur Eksekutif PRAKARSA, Ah Maftuchan menghadiri acara *seminar and symposium* Indonesia Student Research & Summit 2017 yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia di kampus UI Depok.
- 12: Launching Hasil Penelitian Public Private Partnership di bidang Pertanian di Hotel Aryaduta, “Bagaimana Idealnya Kerjasama Antara Pemerintah, Bisnis dan Petani?”
- 13: Oxfam in Indonesia,, Indonesia Global Compact Network, dan ResponsiBank Indonesia menyelenggarakan *Multi Stake-holders Discussion on Business and Human Rights*.
- 19: Direktur Eksekutif Prakarsa menjadi pembicara dalam launching dan diskusi publik “indeks barometer sosial 2017” yang diselenggarakan oleh INFID.
- Desember: Responsibank Indonesia membuat petisi “Campaign Action against the investment to Cirebon coal-fired power plant”.



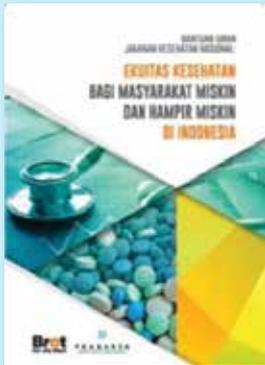
- 1: Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA diundang sebagai salah satu narasumber dalam dialog “Kemiskinan dan Jalan Panjang Bantuan Sosial” bersama Bapak Pungky Sumadi, PhD (Deputi Menteri PPN/ Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan), Professor Bambang Shergi Laksmono (Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial FISIP UI) dan Dr Harry Hikmat (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial).
- 9: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak, dimana Perkumpulan Prakarsa menjadi bagian di dalamnya, menyelenggarakan diskusi “Revolusi Industri dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan”, bertempat di kantor INFID.
- 10: Networking, Prakarsa kedatangan tamu asing yang tidak asing lagi. Bagi akademisi, aktifis dan politisi di Indonesia, nama Professor Olle Tornquist.
- 11: Direktur Eksekutif Prakarsa, menjadi narasumber dalam Talkshow POLEMIK Radio MNC TRIJAYA NETWORK.
- 28: Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, Manager Program Prakarsa Maria Lauranti, Alissa Q. Wahid (Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian), Lynna Chandra (Rachel House), Odang Muchtar (Institut Jaminan Sosial Indonesia, Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi) dan beberapa pimpinan organisasi lainnya mendapat kesempatan berdiskusi tentang Jaminan Kesehatan Semesta bersama pimpinan The Elders antara lain Presiden Zedillo, Perdana Menteri Brundtland, David Nussbaum (Chief Executive- The Elders) di Jakarta.

2.2 PROGRAM PRAKARSA DI TAHUN 2017

A. Social Policy

1. Dalam bidang kesehatan terkait isu jaminan kesehatan semesta (Universal Healthcare Coverage/ UHC)

A. Riset Jaminan Kesehatan Nasional:



Isu kesehatan semakin disadari sebagai prioritas utama target pembangunan di negara-negara berkembang. Kesehatan adalah kunci pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Di tahun 2017 Prakarsa telah menyelesaikan penelitian yang berjudul “Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional: Ekuitas Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia”. Riset ini mendapatkan dukungan dari BFDW (Bread for The World – Protestant Development Service). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah model kebijakan bantuan iuran dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menunjang ekuitas kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin di Indonesia.

Untuk melihat seberapa besar perhatian negara kepada masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan perlu dilakukan dengan temuan-temuan berbasis bukti dalam suatu penelitian. Penelitian tentang ekuitas JKN bagi masyarakat miskin penting untuk dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dalam memperoleh akses dan hak-haknya dalam bidang kesehatan. Hasil penelitian ini menjadi sangat penting disampaikan kepada pemangku kebijakan karena didapatkan berdasarkan bukti di lapangan.

Pendekatan *mixed methods* menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Pendekatan ini menggunakan strategi pencarian data secara simultan atau berurutan untuk memahami permasalahan penelitian. Pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi secara numerik serta teks sehingga *database* akhir penelitian mewakili kedua informasi, baik kuantitatif dan kualitatif. Pada metode kuantitatif, penelitian menggunakan survei rumah tangga. Pada metode kualitatif, penelitian menggunakan studi dokumen kebijakan, data sekunder, dan wawancara informan kunci. Dari penarikan sampel terpilihlah 11 Kota/Kabupaten yakni Kab. Karo, Kab. Bengkalis, Kota Bandar Lampung, Kota Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Semarang, Kota Surabaya, Kab. Lombok Timur, Kota Manado, Kab. Polewali.

Sebagai bagian dari kegiatan advokasi maka dilakukan Pelunduran Hasil Penelitian dan Dialog kebijakan: Kebijakan Bantuan Iuran dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menunjang Ekuitas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia. Hotel Aryaduta Jakarta, 23 MEI 2017



Gambar 1. Kegiatan Diseminasi dan Dialog Kebijakan JKN

B. Penguatan Perencanaan dan Anggaran Kesehatan di Tingkat Daerah

Selain melakukan kajian, penulisan *policy brief* dan hasil publikasi lainnya juga kami lakukan. Sepanjang tahun 2017, kami melakukan advokasi kebijakan di daerah dengan melibatkan CSO lokal. Mitra lokal selama project berjalan antara lain yakni Yasmib (Kab. Mamuju), PIAR (Kota Kupang), Percik (Kab. Semarang) dan LK2P (Kab. Pandeglang). Hasil dari kegiatan advokasi yang dilakukan di daerah antara lain yakni adanya draft Perda KIBBLA di Sulawesi barat, SK Walikota tentang Forum SDGs di Kupang, dan memasukkan isu peningkatan anggaran kesehatan dalam RPJMD daerah. Pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan berbagai dokumen daerah merupakan bagian dari strategi advokasi kebijakan yang Prakarsa lakukan.

2. Isu Ketenagakerjaan

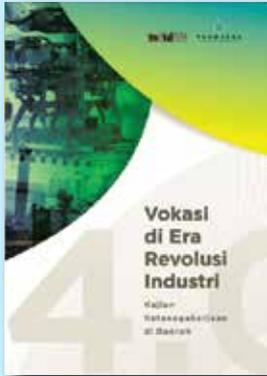
A. Sektor Transportasi *Online*



Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dibahas dalam isu *social policy*. Perkumpulan Prakarsa memiliki beberapa penelitian terkait dengan isu tersebut. Di tahun 2017, kami memiliki sebuah riset lanjutan mengenai tenaga kerja di sector transportasi *online* yang berjudul “The Gojek problem: congestion, informality and innovation in urban transport di Indonesia”. Penelitian ini bekerjasama dengan Dr. Robbie Peters dari ANU, Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara ojek konvensional dan layanan ojek *online* dengan masalah ketenagakerjaan di sector transportasi di Jakarta dan Surabaya. Dan untuk memahami persepsi penumpang di Jakarta dan Surabaya yang menggunakan layanan transportasi baik *online* dan konvensional (ojek tradisional). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengemudi ojek daring masih belum bekerja dalam kondisi layak, hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut antara lain ojek daring memiliki jam kerja lebih lama dibandingkan ojek konvensional, pendapatan bersih di bawah Rp2 juta per bulan, terdapat kesenjangan hubungan kerja antara mitra pengemudi dengan perusahaan. Prakarsa melakukan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan diskusi di berbagai kesempatan untuk mendorong upaya pemenuhan kerja layak, terutama pekerja di sector

transportasi *online* yang sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum yang dapat melindunginya.

B. Kondisi Kerja Layak Anak Muda dan Perempuan



Di tahun 2017, Prakarsa bersama dengan Koalisi Kerja Layak melaksanakan sebuah penelitian untuk memperkaya isu ketenagakerjaan. Penelitian yang berjudul “Survey Penilaian Kebutuhan Anak Muda dan Perempuan (*Need Assessment*) Mengenai Kerja Layak di Indonesia” dilaksanakan di 5 kab/kota yakni Kab. Malang, Kota Jogja, Kab. Wonosobo, Kulon Progo, dan Bojonegoro. Tujuan riset adalah untuk menggambarkan kondisi kerja layak anak muda dan perempuan, selain itu kami juga menggali informasi mengenai pelatihan kerja yang diikuti. Riset ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan penurunan ketimpangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketimpangan dipicu oleh berbagai hal di antaranya terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak berdampak terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kohesi sosial. Hasil penelitian ini kemudian menjadi rujukan dalam pembuatan kertas kebijakan dan didesiminasikan di setiap wilayah penelitian untuk memperluas advokasi kebijakan dan isu ketimpangan tenaga kerja di Indonesia.

B. Fiscal Policy

1. Isu Pajak

A. Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Riset ini membuat daftar inventarisasi masalah dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP merupakan pondasi dalam sistem perpajakan di Indonesia, sayangnya UU KUP masih belum update dengan perkembangan dan isu-isu terkini. Setiap tahunnya revisi UU KUP selalu menjadi agenda dalam prolegnas. Namun, pembahasan revisi UU KUP tergolong lambat di DPR. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui *desk research* dan FGD yang berlokasi di Jakarta.

B. Policy Brief UU KUP

Policy Brief ini berisi beberapa catatan kritis atas sejumlah kelemahan mendasar pada rumusan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam UU KUP yang berpotensi pada tidak tercapainya tujuan reformasi perpajakan yang kita cita-citakan. *Policy Brief* ini merupakan respon dan masukan dari Forum Pajak Berkeadilan baik untuk Pemerintah maupun DPR. Forum Pajak Berkeadilan tetap pada pandangan bahwa reformasi perpajakan seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dimana arah kebijakan pajak harus diupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengumpulan pajak, mencegah, mengendalikan, dan menutup celah hukum (*loopholes*) untuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan memperkuat kerjasama kebijakan perpajakan internasional. Dengan begitu, peran pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dapat berjalan efektif. Mengingat tujuan penarikan pajak adalah “untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perlu menjadi perhatian bahwa di saat agenda global untuk kebijakan perpajakan bertujuan untuk memperketat kebijakan perpajakan dan mempersempit ruang dan kesempatan dari praktik-praktik penghindaran pajak, pemerintah Indonesia cenderung bergerak ke arah lain. Pemerintah Indonesia justru memberikan amnesti pajak, cenderung untuk ikut berpacu dalam perlombaan tarif pajak rendah, dan meneruskan pemberian berbagai insentif pajak seperti perluasan *tax holiday*, *tax allowance* dan pengecualian pajak (*tax exemptions*). Keberadaan UU KUP membuat semakin besarnya ruang praktik terjadinya korupsi dan celah bagi penghindaran pajak.

C. Calculating Illicit Financial Flow from Three Sector

Pada 2016, Prakarsa telah melakukan perhitungan aliran keuangan gelap seperti yang dilakukan oleh Global Financial Integrity (GFI). Metodologi yang dilakukan dengan menggunakan metode yang sama yang dilakukan oleh GFI pada tahun 2001-2014. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa aliran uang haram yang masuk ke Indonesia lebih banyak daripada yang keluar dari Indonesia. Dari penelitian tersebut juga mengeksplorasi darimana dan kemana aliran uang haram tersebut. Pada tahun 2017, Prakarsa dengan dukungan Ford Foundation akan menghitung kembali aliran uang haram namun lebih spesifik pada beberapa komoditas ekspor terbesar dari sektor ekstraktif, manufaktur dan perkebunan.

D. The Use and Abuse Double Treaty Agreement between Indonesia and Netherland



Pada 2017 Prakarsa bersama SOMO Netherland melakukan penelitian bersama (*collaborative research*). Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian pajak berganda antara Indonesia dengan Belanda yang disalahgunakan untuk menghindari pajak. Metodologi yang dilakukan melalui analisis kasus sengketa di pengadilan, mengambil sampel beberapa perusahaan di Indonesia dan menganalisis struktur dan laporan keuangan perusahaan serta melakukan FGD untuk mengkonfirmasi temuan. Saat ini penelitian sedang dalam tahap *proofreading* oleh *expert*.

E. Corporate Tax Research Training for Asian Tax Justice Network

Sebagai co-chair TAFJA (Tax Alliance and Fiscal Justice) Prakarsa dengan dukungan dari SOMO dan Ford foundation menyelenggarakan *training* sebagai bagian dari *capacity building* bagi jaringan regional dan Asia. Materi *training* meliputi bagaimana melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang terindikasi menghindari pajak *treaty shopping* atau *transfer pricing*. Peserta pelatihan sekitar 30 orang yang terdiri dari anggota Forum Pajak Berkeadilan Indonesia dan TAFJA yang terdiri dari APMDD, Action Aid Vietnam, Pakistan dan Timor Leste.

2. Isu Anggaran Negara

A. Open Government: Assessment of e-Government Use by Sub-National in Indonesia



Prakarsa melakukan riset yang berjudul *Open Government: Assessment of e-Government Use by Sub-National in Indonesia*. Mendapatkan dukungan dari MAVC dan IDS. Riset ini hendak mendeskripsikan bagaimana implementasi praktik terbaik (*best practices*) *e-government* berjalan di daerah, dengan mengulas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang turut mempengaruhi lingkungan kebijakan. Penelitian juga bermaksud memberikan gambaran mengenai kontribusi dari penggunaan *e-government* pada partisipasi publik, pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif.

Metode penelitian yang digunakan adalah *strategy testing* atau *adaptive learning theory*. Sebuah inovasi metodologi yang dikembangkan oleh The Asia Foundation untuk menangkap pembelajaran dari praktek kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptasi dan iterasi.

Berbagai fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan *e-government* mampu mengatasi masalah unik di tingkat wilayah, dan dapat disesuaikan dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Buku ini menghadirkan tiga contoh studi kasus penerapan terbaik *e-government* di daerah dimana Jakarta di tingkat provinsi, Makassar di tingkat kota, dan Bojonegoro di tingkat kabupaten. Masing-masing studi kasus ditinjau menggunakan analisis induktif dan deskriptif dengan melihat aspek dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Hal yang menarik adalah di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Bojonegoro, masyarakat cenderung mengikuti dan menggunakan ruang dialog. Melalui ruang dialog pemberdayaan masyarakat terjadi dan menumbuhkan kepedulian dan niat bagi masyarakat untuk menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil. Sementara itu, di daerah yang lebih memiliki pemerintahan sipil seperti Makassar dan Jakarta, penggunaan ruang dialog dan pemanfaatan teknologi cenderung lebih tinggi. Dari ketiga daerah tersebut terdapat kesamaan yakni organisasi masyarakat sipil memiliki peranan vital dalam menjembatani antara masyarakat dan pemerintah.

B. Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan *e-Government* di Daerah dan *Policy Brief* Kesiapan *e-Government* di Indonesia



Output lain dari riset *Open Government* adalah “Buku Petikan Lapangan: Sebuah Refleksi Perjalanan *e-Government* di Daerah”. Buku ini memberikan kisah atau cerita perjalanan dari daerah-daerah yang telah menyelenggarakan *open government* dan mengembangkan *e-government* dalam upaya reformasi birokrasi di daerahnya. Kisah ini merupakan data kecil yang nilai dan maknanya sangat signifikan untuk bercermin sejauh mana pencapaian, prestasi, jatuh, dan bangun pelaksanaan *open government* dan *e-government*. Penulisan kisah ini menggunakan metode *adaptive learning journey* yang menekankan pentingnya menangkap pembelajaran dari praktik kebijakan dan pelaksanaan program pada sebuah lingkungan yang dinamis melalui pendekatan adaptif dan

iterasi. Seringkali karakteristik yang dinamis pada persoalan tidak dapat dijawab dengan solusi yang didesain pada awal kebijakan/program. Cerita-cerita ini ditulis bersama beberapa peneliti dengan pengamatan subjektif dan menggunakan pendekatan refleksi. Penggalan datanya mempertanyakan sejauh mana penyelenggaraan *open government* dan penggunaan *e-government* sungguh-sungguh menyentuh masyarakat, membawa perubahan, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu, Perkumpulan Prakarsa juga menulis sebuah *policy brief* yang ditujukan untuk *stakeholders*, terutama pemerintah baik nasional maupun daerah dalam mengimplementasikan *e-government*.



Gambar 2. Peluncuran Hasil Riset dan Dialog Kebijakan *Open Government*

C. Sustainable Development

1. Isu Komoditas Pokok

A. *Public Private Partnership* di Sektor Pertanian: Kajian atas Sub-sektor Komoditi Beras dan Jagung

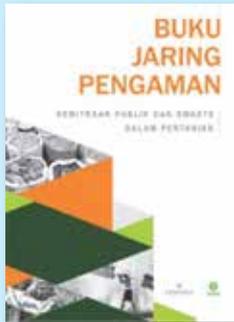


Sektor pertanian memerlukan perhatian utama sebagai penopang ketahanan pangan dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Jika menilik anggaran negara, maka pemerintah mengalokasikan Rp 21,1 triliun untuk pertanian pada tahun 2017 dan Kementerian Pertanian mengajukan anggaran indikatif sebesar Rp 22,66 triliun pada tahun 2018. 85% dari anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat produksi pangan. Nilai tersebut masih jauh dari ideal untuk mampu mendorong terjadinya optimalisasi teknologi dalam ketahanan pangan di Indonesia.

Swasta memiliki kewajiban sebagai pelaku pembangunan. Dengan dorongan yang semakin nyata dikumandangkan dalam prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai oleh Indonesia per tahun 2030, maka kemitraan menjadi sebuah elemen mutlak untuk mengisi pembangunan secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks pertanian, skema Kerjasama Publik-Swasta/KPS (*Private Public Partnership*) dilakukan di Indonesia oleh lingkup yang terbatas, dilihat dari jenis komoditas yang diproduksi, dan jenis kemitraan yang terbentuk. Namun, dalam prakteknya, beberapa KPS terbentuk secara organis atas inisiatif pemerintah daerah atau perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Perkumpulan Prakarsa melakukan sebuah riset yang bertujuan untuk mendeskripsikan model-model *public private partnership* untuk komoditas beras dan jagung di Sragen, Mojokerto dan Malang. Penelitian ini mendapatkan dukungan dari Oxfam di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian adalah *desk research* dan pengambilan data primer menggunakan teknik wawancara mendalam dan FGD.

B. Buku Jaring Pengaman: Kemitraan Publik dan Swasta dalam Pertanian



Selain laporan riset, Perkumpulan Prakarsa juga membuat buku panduan “Jaring Pengaman: Kemitraan Publik dan Swasta dalam Pertanian” (*safeguard*) untuk melindungi semua pihak yang ada di dalam skema Kemitraan Publik dan Swasta. Buku ini disusun sebagai pedoman manajemen risiko atas aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, yang mungkin timbul dari program KPS di sektor pertanian khususnya untuk tanaman pangan. Buku ini ingin memastikan bahwa KPS di sub-sektor pertanian pangan dilakukan berdasarkan praktik-praktik baik dan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sragen khususnya untuk sub-sektor pertanian beras dan Jagung.



Gambar 3. Peluncuran Hasil Riset dan Dialog Kebijakan Kemitraan Publik dan Swasta di Sektor Pertanian

2. Isu Perbankan dan Keuangan Berkelanjutan

A. Masukan Masyarakat Sipil terhadap Peraturan OJK No 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan

Perkumpulan Prakarsa bersama dengan seluruh anggota koalisi ResponsiBank Indonesia turut berkontribusi aktif dalam mendorong OJK merilis Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2013 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komunikasi intens juga dilakukan dengan para petinggi OJK dan Komisi IX DPR RI untuk reformasi regulasi praktik bisnis di sektor keuangan yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan, salah satunya dengan memberikan *White Paper* terkait revisi UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan.

Sebelum POJK tersebut terbit, Koalisi ResponsiBank Indonesia mengadakan beberapa pertemuan dengan OJK untuk mendorong percepatan terbitnya regulasi keuangan berkelanjutan serta memberikan poin-poin rekomendasi terkait hal-hal yang perlu diakomodasi dalam aturan tersebut. POJK No 51/POJK.03/2017 mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan setiap tahun.

B. Multistakeholder Dialogue on Business and Human Rights



Gambar 4. Partisipasi Prakarsa dalam Multistakeholder Dialogue on Business and Human Rights

Dalam Multi Stakeholders Dialogue mengenai Bisnis dan HAM, Prakarsa mewakili Koalisi ResponsiBank Indonesia duduk bersama perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia Global Compact Network, dan Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya mendorong isu-isu hak asasi manusia dalam konteks investasi yang bertanggungjawab.

Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada 13 Desember 2017 dan menjadi ajang dialog yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil yang peduli isu investasi berkelanjutan, regulator, entitas bisnis, dan masyarakat terdampak investasi pembangunan PLTU Cirebon.

C. *White Paper* RUU Perbankan

Untuk mendorong regulasi yang komprehensif atas lembaga keuangan khususnya industri perbankan, sejak tahun 2014 Koalisi ResponsiBank telah berperan aktif dalam lobi dan advokasi untuk mendorong revisi UU No. 7/ 1992 mengenai Perbankan. Selain terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dan bilateral meeting dengan Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa anggota Komisi XI DPR RI, pada tahun 2017 koalisi menyusun *White Paper* terkait revisi UU Perbankan yang merangkum poin-poin rekomendasi dari draft naskah akademik terakhir yang tersedia di DPR.

D. Kampanye Mengancam Pembiayaan Batubara yang tidak Bertanggungjawab dan Berkelanjutan oleh Lembaga Keuangan Internasional

Salah satu advokasi yang cukup besar dan masif dilakukan oleh ResponsiBank Indonesia pada tahun 2017 adalah kampanye penolakan pembangunan PLTU Cirebon Unit II. Perkumpulan Prakarsa mengirimkan surat terbuka kepada ING Bank yang berpusat di Belanda agar menghentikan pembiayaan untuk proyek pembangkit listrik Cirebon Unit II karena terindikasi bermasalah terutama dari aspek legal, sosial, dan lingkungan. Bersama WALHI sebagai bagian

dari anggota koalisi dan Fair Finance Guide Jepang, Prakarsa juga mendorong agar JBIC sebagai bank yang membiayai sindikasi proyek ini menghentikan komitmen pendanaan. Kampanye juga dilakukan secara terbuka melalui kanal-kanal media sosial milik Prakarsa dan seluruh anggota koalisi dan berhasil menarik perhatian publik, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga publik internasional.

E. Case Study Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro Melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)



Keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM. Tujuan riset studi kasus ini untuk mengetahui prinsip keuangan inklusif dilaksanakan dalam pemberian kredit usaha dan menggali lebih jauh dampak penerimaan kredit usaha .

Laporan penelitian ini mengupas program kemitraan yang dilaksanakan oleh bank BUMN dengan mengambil subyek penelitian Bank BNI 46 melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui skema pelaksanaan, dampak penerimaan kredit usaha yang dilakukan oleh Bank BNI 46 terhadap pelaku UMKM industri kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa tengah serta faktor yang berperan dalam menunjang keberhasilan dari Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi langsung/dokumentasi.

3. Isu Energi Berkelanjutan

A. A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia: Challenges and Opportunities 2017

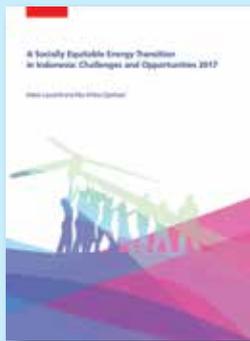
Prakarsa dengan dukungan FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (FES) Indonesia Office membuat sebuah studi mengenai transformasi sosial pemerataan energi/transisi di Indonesia. Penelitian ini akan melihat dua aspek yakni mengenai transformasi energi yang diimplementasikan secara sosial dan transformasi energi diterima dan dilaksanakan secara politik. Perkumpulan Prakarsa dengan 8 negara Asia lainnya yakni Cina, India, Indonesia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam. Riset ini dipimpin oleh Prof. Miranda Schreurs, Technical University of Munich Germany.

Sebagai sebuah persoalan global, perubahan iklim berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat miskin, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan iklim ekstrim. Meski memiliki tingkat gas rumah kaca (GRK) per kapita yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara “*North Global*”, negara-negara di Asia memiliki kontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim. Secara khusus, Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengatasi

tantangan perubahan iklim dan bertransisi ke arah pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan meningkatkan peranan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan.

Indonesia sendiri dalam hal ini memiliki kewajiban menjadikan upaya adaptasi perubahan iklim sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional karena dampak perubahan iklim dapat menyampingkan hak-hak atas kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yakni pangan, papan, dan sandang. Mayoritas masyarakat adat dan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani sangat bergantung kepada variabilitas cuaca terhadap mata pencaharian mereka. Apabila dampak negatif dari perubahan iklim betul-betul terjadi, maka dapat dipastikan akan terjadi distorsi terhadap sumber ekonomi mereka dan mengancam hak-hak kesejahteraan mereka. Selain itu dampak perubahan iklim lainnya yakni pengabaian terhadap proses adaptasi perubahan iklim akan memperlambat proses penanggulangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya ancaman perubahan iklim pun, proses penanggulangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah mengalami proses yang lambat.

A Socially Equitable Energy Transition in Indonesia: Challenges and Opportunities 2017



Isu perubahan iklim telah menjadi perhatian serius tidak hanya dikarenakan peningkatan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berbagai dampak yang ditimbulkan semakin mengkhawatirkan. Mulai dari cuaca ekstrem hingga peningkatan permukaan air laut. Bahkan, perubahan iklim pun turut menghambat usaha pengentasan kemiskinan.

Indonesia mulai menghadapi permasalahan cadangan sumber daya bahan bakar fosil. Dari waktu ke waktu produksi minyak dan gas domestik terus menurun sehingga membuat pemerintah mendorong kebijakan energi terbarukan sebagai prioritas utama. Walaupun Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang bergitu melimpah, kenyataannya perkembangan pencapaian sumber daya energi terbarukan terhadap total energi masih minimal. Upaya mempercepat transisi dari energi yang masih bergantung pada sumber daya fosil ke energi terbarukan saja tidak cukup, namun juga perlu memastikan secara sosial berkeadilan.

Buku ini menampilkan studi yang mengobservasi bagaimana transisi energi menuju penggunaan yang lebih besar pada energi terbarukan dapat secara sosial dan politik diterima di Indonesia dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar secara progresif mengejar transformasi energi. Sebuah studi yang memberikan wawasan terhadap status kebijakan perubahan iklim dan energi, implikasi sosial ekonominya, dan aktor yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dan pemikiran yang dapat membantu pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia.



Gambar 5. Partisipasi Prakarsa dalam kegiatan The Regional Energy Workshop Across FES in Asia

B. Political Economy on EITI (Ekonomi Politik Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif)

EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah. Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat.

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI pada perwakilan dari *Transparency International* Indonesia. Wakil Ketua KPK pada saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas dan Deputi KPK untuk Pencegahan Waluyo meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaannya. Peraturan Presiden mengenai EITI lalu dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tahun berikutnya Menko bidang Perekonomian saat itu, Boediono, memimpin rapat koordinasi untuk EITI, dan akhirnya di tahun 2010 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden no 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari dari Industri Ekstraktif.

Tujuan dari riset ini adalah untuk memetakan aktor politik dalam mendorong EITI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan informan kunci dan data sekunder berasal dari studi terdahulu, jurnal dan artikel. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Melbourne dengan melibatkan Andrew Rosser, University of Melbourne.



III. JARINGAN DAN AFILIASI

3.1 FORUM, AFILIASI PRAKARSA & RESEARCH ASSOCIATE

Perkumpulan Prakarsa membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah dan parlemen, otoritas keuangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian nasional/daerah di Indonesia dan luar negeri, organisasi masyarakat sipil (nasional, daerah dan internasional), sektor swasta, kedutaan besar, organisasi internasional, dan lain-lain.

Perkumpulan Prakarsa mengupayakan kemitraan dalam kerja-kerja advokasi dalam bentuk forum, konsorsium dan/atau koalisi, dengan tujuan penguatan strategis dan kapasitas CSO untuk mendorong isu perubahan kebijakan di tingkat nasional. Perkumpulan Prakarsa mengutamakan potensi kemitraan di tingkat sub-nasional, baik dengan pemerintah maupun CSO lokal. Kemitraan yang dibangun merupakan relasi advokasi yang konstruktif dan kritis, serta independen untuk menguatkan aktor dan relasi dalam lingkup dan proses kebijakan di Indonesia.

Internasional



Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPH) adalah pusat penelitian ekonomi dibawah naungan *Oxford Department of International Development*, Universitas Oxford. Prakarsa bersama OPHI pada tahun 2014 menyelenggarakan penelitian Indeks Kemiskinan Muldimensi (Multidimensional Poverty Index/ MPI) di Indonesia.



Tax Justice Network (TJN) didirikan pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang fokus pada isu pajak. Prakarsa diundang bergabung dalam jaringan pajak berkeadilan lintas Negara pada 2011. Kegiatannya antara lain penelitian bersama, membuat Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI), dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas CSO.



JustJobs Network adalah organisasi non-partisan yang memproduksi penelitian empiris untuk isu menciptakan pekerjaan yang layak.

Prakarsa melakukan penelitian tentang Tenaga Kerja di ranah *On Demand Economy* khususnya Platform Transportasi Online. Fokus pada isu-isu ketenagakerjaan seperti kerja layak, ekonomi digital, *basic income*, dan lain sebagainya.



Fair Finance Guide International (FFGI), dipelopori di Belanda pada tahun 2009, FFGI adalah jaringan masyarakat sipil internasional yang diinisiasi oleh Oxfam Novib, untuk memperkuat komitmen bank dan institusi keuangan lainnya terhadap standar-standar sosial, lingkungan dan hak asasi manusia. Prakarsa menjadi bagian dari FFGI sejak tahun 2013, di level nasional Prakarsa menginisiasi pembentukan Koalisi Responsibank Indonesia.

Fair Finance Asia (FFA), merupakan program regional Asia yang fokus mereduksi dampak negatif dari investasi lembaga keuangan dan memastikan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan perubahan iklim, dan meningkatkan investasi pro-pengentasan kemiskinan untuk pembangunan ekonomi inklusif di Asia. Negara yang tergabung adalah Indonesia, Jepang, India, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 2018 agenda yang dilakukan adalah melakukan penelitian tentang pemeringkatan bank di Indonesia, *joint-research* tentang studi kasus yang berkaitan dengan isu *fair finance* di Asia.



Financial Transparency Coalition (FTC) adalah jaringan global yang bekerja untuk mengurangi aliran keuangan gelap melalui promosi transparansi, akuntabilitas, dan sistem keuangan internasional. FTC didirikan pada tahun 2009. Prakarsa merajut jaringan dengan FTC sejak tahun 2015 dan pada Maret 2018, status Prakarsa di dalam FTC bukan lagi jaringan, melainkan berganti menjadi anggota penuh FTC. Prakarsa pernah menghadiri rapat internasional untuk anggota dan jaringan FTC dua kali, pertama di Washington D.C pada tahun 2016 dan kedua di Helsinki pada tahun 2017.



Institute for Social Entrepreneurship in Asia (ISEA) adalah jaringan pembelajaran dan praktek pembelajaran yang diformulasikan oleh para *social enterprise* dan lembaga-lembaga sumber daya *social enterprise*. Di Indonesia, hanya ada 3 organisasi yang terdaftar sebagai anggota ISEA yakni, Prakarsa, Dompot Dhuafa, dan Bina Swadaya. Prakarsa bergabung dengan ISEA sejak tahun 2014 dan *concern* dengan isu-isu *social entrepreneurship*.



Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), dibentuk pada tahun 2014. TAFJA adalah bagian dari *The Global Alliance for Tax Justice (GATJ)*. TAFJA merupakan ruang strategis bagi Prakarsa untuk menyemestakan gagasan-gagasan transparansi, demokrasi, dan redistribusi kekayaan di level kawasan. Sejak tahun 2014, Prakarsa duduk sebagai *co-chair* di regional Asia Tenggara.

Policy Research Network (PRN) adalah koalisi yang terdiri dari CSO yang bergerak di bidang penelitian. Adapun CSO yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya, CSIS, Paramadina Institute, Article 33, LPEM UI, KPPOD, WRI, YIPD, Prakarsa, dan lain sebagainya. Tujuan dari koalisi ini untuk memperkuat jaringan CSO yang bergerak di bidang penelitian, serta sebagai wadah untuk diseminasi pengetahuan yang dibangun.



Komisi Anggaran Independen (KAI), dibentuk pada tahun 2014. Tak lama berselang setelah dibentuk, komisi memproduksi sebuah "kertas kebijakan" untuk penyusunan APBN 2015. Pada tahun 2014, KAI juga pernah dimintai masukannya untuk tim transisi presiden terpilih, Joko Widodo. KAI pernah membantu merumuskan anggaran berbasis program tahun 2016 yang kemudian diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sejak tahun 2017 hingga saat ini, KAI mengalami "vacuum" sebab kesibukan urusan domestic dari setiap anggota komisi.

Green Economy Caucus DPR-RI (GEC DPR-RI) beranggotakan anggota DPR-RI dari lintas fraksi, dan didukung oleh unsur-unsur kelompok masyarakat yang peduli dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan sosial, serta ramah dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Prakarsa menginisiasi GEC DPR-RI pada tahun 2013. Inisiasi Prakarsa terwujud dalam tindakan mengajak anggota DPR RI untuk membuat GEC DPR-RI. Setelah terbentuk, Prakarsa mendorong GEC DPR-RI untuk bergabung dalam jaringan parlemen dunia yang peduli terhadap isu-isu ekonomi hijau, Globe International dan terlibat dalam *Conference of The Parties under UN Framework Convention on Climate Change*.

Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) adalah jaringan lintas organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk menegakkan pajak yang berkeadilan di Indonesia melalui pemberantasan kejahatan pajak di Indonesia, baik *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Dibentuk pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, FPBI memberikan usulan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dari dua pasangan calon untuk memasukkan pajak berkeadilan sebagai isu prioritas dalam program kerja pemerintahan.



Koalisi Responsibank Indonesia adalah bagian dari jaringan global *Fair Finance International*. Anggota Koalisi Responsibank saat ini adalah Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NGOs Forum for Indonesian Development), PWYP (Publish What You Pay) Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan ICW (Indonesian Corruption Watch), -tetapi tidak menutup kemungkinan bagi organisasi lain yang memiliki kepedulian serupa untuk bergabung dimasa datang. Berdiri pada tahun 2014 atas inisiasi Prakarsa, salah satu advokasi yang berhasil dilakukan oleh ResponsiBank adalah kontribusinya pada diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang

Keuangan Berkelanjutan. Saat ini, ResponsiBank sedang melakukan advokasi terhadap RUU perbankan.

Koalisi Kerja Layak dibentuk pada tahun 2016 oleh Prakarsa, INFID, Universitas Indonesia, IRE, Lakpesdam NU, dan P3M. Koalisi ini aktif memperkaya wacana mengenai pentingnya *vocational & educational training* (VET) bagi angkatan kerja baik itu yang akan memasuki pasar kerja maupun yang sudah bekerja.

Forum Advokasi JKN (FAJ) fokus pada isu-isu kesehatan, khususnya sistem jaminan kesehatan nasional. Forum ini dibentuk pada pertengahan tahun 2016 atas inisiasi Prakarsa. Anggotanya yaitu Perkumpulan Prakarsa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Indonesia (PELKESI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Article 33, BPJS Watch, Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPPIKA), INFID, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Gagasan besar forum ini adalah mewujudkan JKN yang berbasis prinsip *Universal Health Coverage* (UHC) yang sejati dan implementasi nilai-nilai JKN dalam UU SJSN secara menyeluruh.

3.2 KEPERCAYAAN PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES MAGANG

Salah satu komitmen Prakarsa sebagai salah satu lembaga penelitian, maka di tahun 2017 kami terbuka kepada mahasiswa yang ingin melakukan magang ataupun praktikum di Prakarsa. Namun, dalam proses penerimaan mahasiswa magang tetap dilakukan seleksi berdasarkan minat isu yang ingin diperdalam. Sepanjang 2017, terdapat empat orang mahasiswa yang berkesempatan magang di Prakarsa.

1. Venny Desna: Universitas Indonesia, Depok. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Fiskal. Periode magang Mei-Juli 2017, dan isu yang diminati adalah *fiscal policy*.
2. Anggara Yudha Zunivar: Universitas Indonesia, Depok. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Periode magang Agustus-Desember 2017, dan isu yang diminati adalah *sustainable development* dan *social campaign*.
3. Novitri Wahyuni: Universitas Indonesia, Depok. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Periode magang Agustus-Desember, dan isu yang diminati adalah *social policy*.
4. Noah Ikkyu Swadhesi: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Periode magang Desember 2017-Januari 2018, dan isu yang diminati adalah *fiscal and economy policy*.

Melihat dari minat perguruan tinggi yang merekomendasikan mahasiswanya untuk melakukan magang di Prakarsa, maka hal tersebut merupakan kepercayaan mereka terhadap Prakarsa sebagai *think tank-based* NGO yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswanya.

3.3 LEMBAGA DONOR 2017

Universitas



<https://www.uic.edu/>



<http://www.ids.ac.uk/>



<http://www.anu.edu.au/>

Filantropis



<https://www.fordfoundation.org/>

Think-Tank



<https://www.fesdc.org>



<https://www.somo.nl/>

Development agencies



<https://www.brot-fuer-die-welt.de>



<https://www.oxfamnovib.nl/>



<https://www.tifafoundation.org/>



<https://www.oxfam.org/>



<https://www.norad.no>



<https://www.hivos.org/>



IV. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN

Tahun 2017 merupakan tahun *network expansion* dalam kerja-kerja kami. Pada tahun 2017, Perkumpulan Prakarsa terlibat kerjasama dalam berbagai jaringan internasional dan nasional untuk memperkuat produksi dan *sharing* pengetahuan, advokasi kebijakan berbasis bukti dan pembiayaan organisasi. Dengan bertambahnya jejaring dan program yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Prakarsa, tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia, baik dari segi program maupun administrasi dan keuangan.

Meskipun tahun 2017 merupakan tahun yang cukup gemilang dalam perluasan jejaring dan program, namun secara internal organisasi, Perkumpulan Prakarsa mengalami tantangan yakni terjadi beberapa kali pergantian staf (*turnover*) pada posisi *finance officer*, *finance assistant*, *social policy officer*, *sustainable development officer*, serta *HR and admin officer*. Sepanjang tahun 2017 posisi *research manager* juga dirangkap sekaligus oleh *program manager*. Meski demikian, dengan adanya dinamika, adaptasi, dan koordinasi yang cukup matang antara staf lama dengan staf baru, berhasil membuat segala masalah dan tantangan dapat dikelola dengan baik.

4.1 PENGUATAN INTERNAL ORGANISASI



Rapat Kerja

Prakarsa selalu mengagendakan rapat kerja di awal tahun, yakni pada bulan Januari 2017. Pada rapat kerja tahun 2017, dibahas beberapa agenda yakni mengagendakan program-program dan riset yang akan berjalan di tahun 2017, membuat *timeline*, alokasi keuangan dan pembagian tim kerja. Selain itu dibahas juga SOP program, keuangan dan administrasi untuk dilihat kembali dan direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Outing Staff

Pada tahun 2017, *outing staff* dilakukan pada tanggal 28 Juni 2017. *Outing* diperlukan sebagai ajang *refreshing*/rekreasi serta hiburan untuk me-*recharge* agar seluruh staf Prakarsa memiliki semangat kerja yang tetap terjaga. *Outing* kali ini bukan hanya diikuti oleh internal staf Prakarsa saja, tetapi juga melibatkan *Member of Board* Prakarsa beserta dengan keluarga. Kami mengambil lokasi di Pirates Bay Bali, dimana *games treasure hunt* menjadi pilihan. Setiap tim menikmati permainan, kerjasama tim sangat diperlukan sampai akhir permainan dan setiap orang sangat menikmatinya. Kegiatan tersebut semakin menambah soliditas kerjasama diantara para staf.



Board Meeting

Di tahun 2017, *Board Meeting* dilaksanakan pada bulan Februari dan Juni 2017. *Board Meeting* menjadi indikator untuk memotret tata pengurusan internal Prakarsa. Penyelenggaraan *Board Meeting* merupakan mekanisme penting, karena *board* memainkan peran dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Agenda yang dibahas dalam rapat antara lain yakni pelaporan badan pengurus harian atas kinerja program dan pengelolaan keuangan. Selain itu, *board* juga menyampaikan tanggapannya untuk kemudian diberikan masukan perbaikan atau rencana strategis untuk tahun yang akan datang. Komunikasi dan komitmen yang dibangun antara badan pengurus harian dan *board* sangat penting untuk kemajuan Prakarsa.

Learning Day and English Day

Selama tahun 2017, *Learning Day & English Day* dilakukan setiap hari Jumat. Sebagai salah satu kembang kajian dan penelitian, budaya belajar perlu terus dilakukan oleh internal staf Prakarsa. Setiap orang didorong untuk mampu berkomunikasi aktif berbahasa Inggris. Kami meluangkan waktu untuk sesi *Learning Day* selama 2 – 4 jam, diisi oleh internal staf maupun mengundang *expert* yang ahli di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Terkadang kegiatan ini juga menjadi salah satu saluran kegiatan yang dapat diisi dengan games sehingga terjalin hubungan yang semakin erat antar staf. Kedepannya, Prakarsa berharap *Learning Day* bukan hanya diperuntukkan bagi internal staf Prakarsa saja melainkan dapat diikuti oleh pihak luar seperti mahasiswa, CSO maupun lembaga lainnya sebagai pusat pembelajaran.

Diskusi Tematik

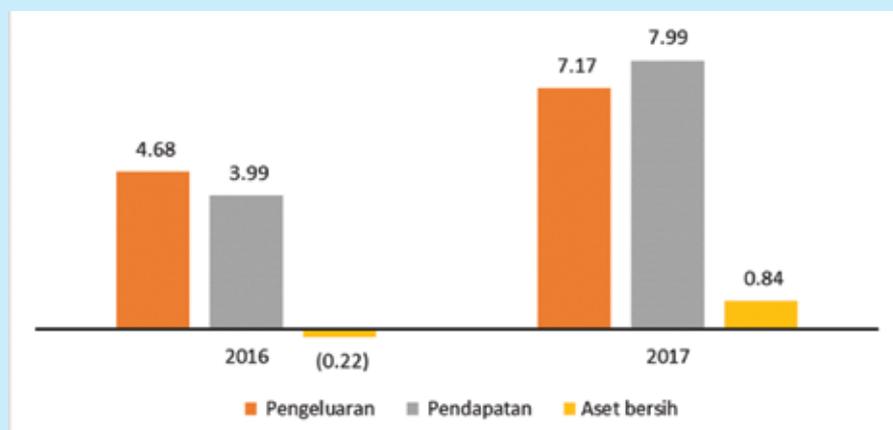
Prakarsa rutin mengadakan diskusi tematik baik di internal staf Praarsa maupun dengan pihak luar. Di Internal sendiri diskusi terintegrasi dalam kegiatan learning day. Sedangkan diskusi yang melibatkan pihak luar melibatkan forum-forum advokasi dengan narasumber terkait sesuai dengan tema yang dibahas. Kegiatan ini bukan hanya membahas isu-isu yang tengah dialami, namun juga sebagai upaya dalam merespon permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

4.2 LAPORAN KEUANGAN

Sepanjang tahun 2017, Prakarsa mengelola dana sebesar Rp7.999.874.424. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp3.990.246.323 (lihat Grafik 1). Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, maka dana yang dikelola untuk program kegiatan dan belanja rutin meningkat dari Rp4,68 miliar menjadi Rp7,17 miliar di tahun 2017. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 53,2 persen.

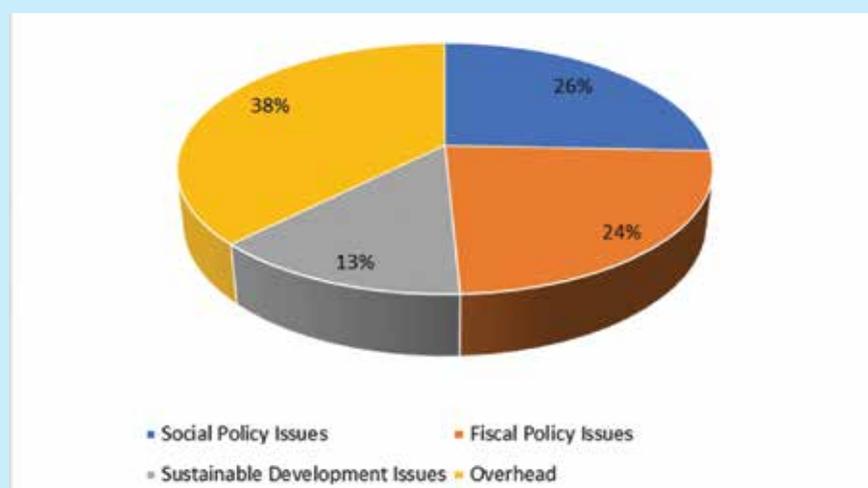
Kami melakukan langkah-langkah pengelolaan keuangan secara efisien sehingga pada tahun 2017 mampu menghasilkan surplus aset bersih sebesar Rp844.463.742 bandingkan dengan tahun 2016 defisit senilai Rp223.080.710.

Grafik 1. Pendapatan dan Pengeluaran Perkumpulan Prakarsa 2016-2017 (dalam miliar rupiah)



Berdasar fokus kerja Prakarsa, alokasi dana untuk isu kebijakan sosial 26 persen, isu kebijakan fiskal 24 persen dan isu kebijakan pembangunan berkelanjutan 13 persen. Total belanja program atau kegiatan pada 2017 sebesar 63 persen. Sementara belanja rutin (overhead) sebesar 37 persen (lihat Grafik 2). Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan organisasi semakin efektif dan efisien.

Grafik 2. Pengelolaan Dana Program Berdasar Fokus Kerja Prakarsa Tahun 2017



4.3 HASIL AUDIT

Berdasarkan audit tahun buku 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Kristiaji Registered Public Accountant Number: Kemenkeu RI 75/KM.1/2015, hasil opini audit adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

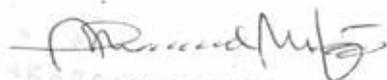
PERKUMPULAN PRAKARSA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 dan 2016 (Dinyatakan Dengan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)			PERKUMPULAN PRAKARSA Statement of Financial Position December, 31 2017 and 2016 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	31 Des 2017 / Dec 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Des 2016 / Dec 31, 2016		
	Rp	No.	Rp		
ASET				ASET	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas	496,601,264	3e, 4	102,348,115	Cash and Cash Equivalent	
Piutang	16,471,612	3d, 5	36,500,000	Other Receivable	
Uang Muka	358,688,250	3e, 6	2,109,440,206	Advance Payment	
Biaya Dibayar Dimuka	19,291,560	7	-	Prepaid expenses	
JUMLAH ASET LANCAR	891,052,686		2,248,288,321	TOTAL CURRENT ASSETS	
ASET TETAP				FIXED ASSET	
Bangunan	1,150,000,000	3f, 8	1,150,000,000	Building	
Kendaraan	10,900,000	3f, 8	10,900,000	Vehicle	
Meubelair	52,753,030	3f, 8	52,753,030	Furniture	
Peralatan dan Perlengkapan	241,089,800	3f, 8	232,091,800	Equipment	
HARGA PEROLEHAN	1,454,742,830		1,445,744,830	COST OF ACQUISITION	
Akum. Penyusutan Aset Tetap	(1,454,742,830)		(1,445,744,830)	Acc. Depreciation Fixed Asset	
NILAI BUKU	-		-	BOOK VALUE	
ASET LAIN-LAIN				OTHER ASSET	
Aset Tak Berwujud	1,980,591	9	-	Intangible Assets	
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(495,148)		-	Intangible Assets Amortization	
Nilai Buku	1,485,443		-	BOOK VALUE	
TOTAL ASET	892,538,129		2,248,288,321	TOTAL ASSETS	
LIABILITIES JANGKA PENDEK				SHORT TERM LIABILITIES	
Utang Usaha	7,539,093	10	330,000	Tax Payable	
Utang Lainnya	40,535,294	11	2,471,039,031	Other Payable	
JUMLAH LIABILITIES JK PENDEK	48,074,387		2,471,369,031	TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	
LIABILITIES JANGKA PANJANG				LONG TERM LIABILITIES	
Kewajiban Imbalan Kerja	-		-	Post-Employment Benefit Obligation	
JUMLAH LIABILITIES JK PANJANG	-		-	TOTAL LONG TERM LIABILITIES	
ASET BERSIH				NET ASSETS	
Aset Bersih Tidak Terikat	727,085,357	12	(807,215,770)	Unrestricted	
Aset Bersih Terikat Temporer	117,378,385		584,135,060	Temporary restricted	
JUMLAH ASET BERSIH	844,463,742		(223,080,710)	TOTAL NET ASSETS	
JUMLAH LIABILITIES DAN ASET BERSIH	892,538,129		2,248,288,321	TOTAL LIABILITIES DAN NET ASSETS	

Disiapkan Oleh
Prepared by



Erlin Setiawan
Finance and Accounting

Diperiksa dan Disetujui Oleh,
Reviewed and approved by



Ah. Muflichan, M.Kesum
Direktur Eksekutif

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
See accompanying notes from financial statements which are an integral part of the financial statements

PERKUMPULAN PRAKARSA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017

PERKUMPULAN PRAKARSA
STATEMENTS OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017

KETERANGAN	Catatan /Notes No.	Tahun 2017 / Year 2017		Jumlah/ Amount	DESCRIPTIONS
		Tidak Terikat/ Unrestricted	Terikat Temporary/ Temp. Restricted		
Pendapatan					
Pendapatan Terikat Temporer	3h. 13	-	4.994.998,316	4.994.998,316	Temporary Restricted income
Pendapatan Tidak Terikat		3.004.876,108	-	3.004.876,108	unrestricted income
JUMLAH		3.004.876,108	4.994.998,316	7.999.874,424	TOTAL
BEBAN					
Program	3h. 14,15	-	5.461.754,990	5.461.754,990	Programme Expenses
Beban Umum dan Administrasi		1.705.224,730	-	1.705.224,730	General and Adm. Expenses
Jumlah beban		1.705.224,730	5.461.754,990	7.166.979,720	Total expenses
Perubahan Aset Bersih		1.299.651,379	(466.756,675)	832.894,704	Changes in net assets
Penyesuaian saldo		234.649,748	-	234.649,748	Balance adjustment
Aset Bersih Awal Tahun		(807.215,770)	584.135,060	(223.080,710)	Beginning Balance net assets
Aset Bersih Akhir Tahun		727.085,357	117.378,385	844.463,742	Ending Balance net assets

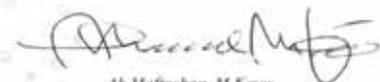
KETERANGAN	Catatan /Notes No.	Tahun 2016 / Year 2016		Jumlah/ Amount	DESCRIPTIONS
		Tidak Terikat/ Unrestricted	Terikat Temporary/ Temp. Restricted		
Pendapatan					
Pendapatan Terikat Temporer	3h. 13	-	3.899.913,083	3.899.913,083	Temporary Restricted income
Pendapatan Tidak Terikat		90.333,240	-	90.333,240	unrestricted income
JUMLAH		90.333,240	3.899.913,083	3.990.246,323	TOTAL
BEBAN					
Beban Umum dan Administrasi	3h. 14,15	-	-	-	General and Adm. Expenses
Beban Program		-	4.678.859,663	4.678.859,663	Programme Expenses
Jumlah beban		-	4.678.859,663	4.678.859,663	Total expenses
Perubahan Aset Bersih		90.333,240	(778.946,580)	(688.613,340)	Changes in net assets
Penyesuaian saldo		-	-	-	Balance Adjustment
Aset Bersih Awal Tahun		(897.549,010)	1.363.081,640	465.532,630	Beginning Balance net assets
Aset Bersih Akhir Tahun		(807.215,770)	584.135,060	(223.080,710)	Ending Balance net assets

Distapkan Oleh
Prepared by



Erlin Setyanati
Finance and Accounting

Diperiksa dan Ditetujui Oleh,
Reviewed and approved by



Ah Muflichan, M.Kesos
Direktur Eksekutif

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
See accompanying notes from financial statements which are an integral part of the financial statements



V. PRAKARSA DALAM MEDIA

5.1 PRAKARSA DALAM BERITA SEPANJANG TAHUN 2017

Berita *online*:



Berita *offline*/media cetak:

1 April 2017: Kemiskinan Multidimensi Terabaikan, Kompas

4 Januari 2017: NTT Provinsi termiskin ketiga, NTT Post

Opini di media cetak:

24 November 2017: Dealing with banks involved in financing crimes, Jakarta Post







P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan Prakarsa

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8E RT 010 RW 06 Kel/Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520 - Indonesia

Ph. +62 (21)7811-798 Fax. +62 (21)7811-897

E-mail to: perkumpulan@theprakarsa.org